

# **PERLAWANAN MASYARAKAT LASKAP**

**(Kasus Sistem Pengelolaan Daya Listrik PT.VALE, PLTA Karebbe,  
Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)**

## **SKRIPSI**

**ARBIN  
E41111255**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

# **The Resistance of LASKAP Community**

**(A Case of Electrical Power Management of PT. VALE PLTA Kareboo,  
Laskap Village, Malili Subdistrict, East-Luwu Regency).**

**SKRIPSI**

**ARBIN  
E41111255**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL** : **PERLAWANAN MASYARAKAT LASKAP**  
(Kasus Sistem Pengelolaan Daya Listrik  
PT.VALE PLTA Karebbe, Desa Laskap,  
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)

**NAMA** : **ARBIN**

**NIM** : **E41111255**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II

Untuk diajukan pada Panitia Ujian Seminar Skripsi

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Makassar, 14 Juli 2015**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**Dr. H.Suparman, M.Si.**  
NIP. 196810715 199403 1 004

**Pembimbing II**



**Sultan, S.Sos, M.Si.**  
NIP. 19691231 200801 1 047

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Sosiologi**  
**FISIP UNHAS**



**Dr. H. M. Darwis, MA.,DPS.**  
NIP 19610709/198601 1 002

## LEMBAR PENERIMAAN EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Evaluasi Skripsi

Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Univeristas Hasanuddin

**JUDUL** : **PERLAWANAN MASYARAKAT LASKAP**  
(Kasus Sistem Pengelolaan Daya Listrik  
PT.VALE PLTA Karebbe, Desa Laskap,  
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)  
**NAMA** : **ARBIN**  
**NIM** : **E41111255**

Pada :

Hari/Tanggal : Senin, 6 Agustus 2015

Tempat : Ruangan Ujian Jurusan Sosiologi

### TIM EVALUASI SKRIPSI

**Ketua** : **Prof. Dr. Maria E. Pandu, MA**  
**Sekrertaris** : **Ria Renita Abbas, S.Sos, M. Si.**  
**Anggota** : **Dr. H. M. Darwis, MA, DPS.**  
**Dr. Syaipullah Cangara, Msi**  
**Sultan, S.Sos, M.Si**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## **PERNYTAAN KEASLIAN SKRIPSI**

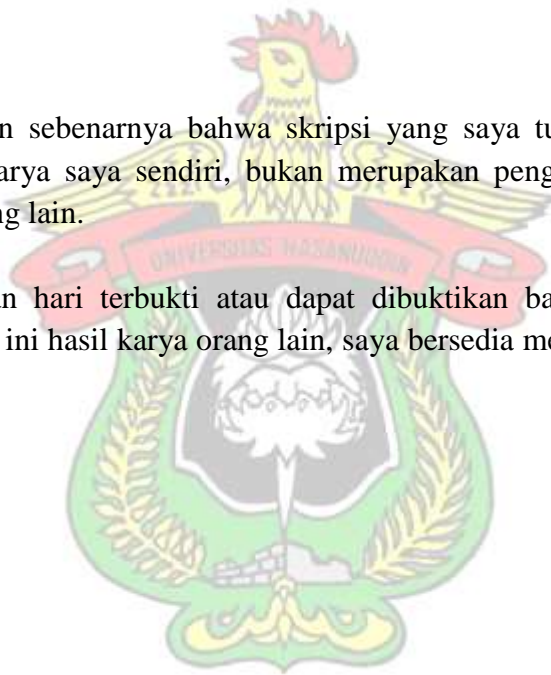
**JUDUL : PERLAWANAN MASYARAKAT LASKAP**  
**(Kasus Sistem Pengelolaan Daya Listrik**  
**PT.VALE PLTA Karebbe, Desa Laskap,**  
**Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)**

**NAMA : ARBIN**

**NIM : E41111255**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Makassar, 14 Juli 2015

Yang menyatakan

**Arbin**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan kepada Yang utama dari segalanya

Rasa syukur yang tiada henti kepadamu yang Maha cinta, Maha sempurna dari segala kesempurnaan yang ada yang telah engkau ciptakan, beribu-ribu kata syukur yang kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang engkau berikan kepada kami berupa sebarang ilmu yang engkau titipkan kepada kami sejak kami dilahirkan sampai saat ini dengan rahmat serta ridhoma pula engkau berikan kami perlindungan dan kesehatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kami turunkan dari mulut ini dengan penuh keikhlasan atas bagi Nabi Allah Muhammad SAW pembawa kebahagiaan sejati bagi para pengikutnya.

Segalanya kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang kusayangi dan kukasihi.

Kupersembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta

Atas segala pengorbanan, jasmu yang telah melahirkan, membesarkan serta mendidiku, kupersembahkan karya ini sebagai bukti akan rasa hormat dan terimakasihku atas segalanya kepadamu Ayahandaku Alfan dan Ibundaku Yuliyana, walaupun sejumlah tulisan ini tidaklah mampu senilai dengan semua pengorbanan yang engkau berikan kepadaku. Beribu ucapan terimakasih kepada ayahanda dan ibundaku atas segala doa, kasih sayang, nasehat dan segala motivasi yang tak henti engkau berikan kepadaku, semoga ini merupakan awal yang menjadi tonggak bagiku untuk kedepannya mewujudkan kebahagiaan untuk kalian berdua.

Kupersembahkan kepada saudara dan saudariku

Bagimu saudara dan saudariku, Surya, Mutia, Alfin, Yugi dan Arlan walau terkadang selalu ada hal yang membuat kita bertengkar namun sejatinya tak ada yang mampu menggantikan rasa kebersamaan itu ketika kita berkumpul bersama dalam sebuah pondok kecil kita. Hanya kata maaf yang dapat terucap dari hati yang tulus atas kekurangan dan keburukan yang saya miliki serta tak mampu jadi panutan yang baik bagi kalian.

## KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil “Aalamiin” Pujian dan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wata’ala dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Shallallahu’alaihi WaSallam. Karena sesungguhnya tanpa rahmat dan hidyaah-Nya maka kita dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditetapkan oleh Allah

Lapora ini merupakan skripsi yang disusun oleh penulis yang berjudul Perlawanan Masyarakat Laskap. Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat dorongan suport dari sejumlah keluarga, pembimbing, dosen, Teman yang berupa nasehat, doa, tenaga maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda ALFAN dan Ibundaku tersayang Yuliyana yang telah memberikan restunya dan terlebih mebiyayai ananda selama studi sampai akhirnya dalam penulisan skripsi ini.
2. Buat saudara dan saudariku, Kakanda Surya, Adinda Mutia,Alfin, Yugi dan Arlan, terimakasih atas bantuannya dalam penyusunan skripisi ini.
3. Buat ibunda Nurshida dan Nurida, yang senantiasa memebrikan dorongan kepada penulis
4. Kanda Asrul Ali, Akbar.M, Rusli, yang senantiasa memberikan suport bagi penulis dalam melaksanakan peneltian
5. Ibu Prof. Dwia Aries Tina Pelubuhu selaku Rektor Universitas Hasanuddin
6. Bapak Dr. Drawis selaku ketua jurusan sosiologi,
7. Bapak Dr. H.Suparman, M.Si dan Sultan, S.Sos, M.Si
8. Para Dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis menempu masa kuliah di kampus sehingga dalam penelitian, penulis mampu mengimplementasikan ilmu tersebut
9. Para staf di Jurusan Sosiologi Fisip Unhas, buat Kakak, Pak Masmudir, Bu Ros, Dg. Rahman, terima kasih atas kerja samanya selama ini
10. Buat sahabat penulis, Irwansyah,Ryan,Reni Angreni ,Awal, Viko, Arliansyah, Rima, Nova, Ansyar Hidayat, Firman, Novita Ayuningsih, terima kasih atas kebersamaannya selama ini karena adanya kalian penulis memiliki semangat yang lebih dalam menyelesaikan semua ini

11. Buat sahabatku, Muksin, Iccang, Fatir, Dhita, Dian, Kholis, Sahlan, Kamaruddin, Syaipul, Riag, Riswan, Irwan, Fajiri, Idris, Afsal, Taslim, Yusnan, Karlina, Sry, Ipa, Samsam, Rosmini, Ida, Ani, Atira, Rini, Uppa, Atira, Pade, Anti, dan semuanya yang telah memebewi warna didunia kampus dengan penulis.
12. Buat senior dan Yuniarku tetap semangat, semuanya pasti akan lebih baik
13. Buat KEMASOS, KPU FISP, HMI Komisariat FISIP Unhas, terima kasih atas pendidkan mengenai Organisasi dan Lembaga , semoga selalu berjaya.
14. Semua pihak yang turut terlibat dan memabatu penulisan dan penyusunan skripsi ini yang tak semapat penulsi sebutkan, pennulis mengucapkan banyak terima kasi atas semua kerja samanya.

Kata orang bahwa, Tiadak ada mahluk yang lebih sempurna kecuali pemilik kesempurnaan tersebut, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, masih banyak menuai kekerungan, baik dalam penulisan maupun penyusunan yang diatur dalam standar penulsian karya ilmiah yang baik, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat konsturktif senantiasa penulis harapkan agar karya tulis ini menjadi lebih bermakna bagi kahlayak banyak.

Semoga segala aktifitas kita senantiasa menjadi amal ibadah disisi Alaah SWT. Amin

Wassalam



## ABSTRAK

**Arbin, E411 11 255. *PERLAWANAN MASYARAKAT LASKAP (Kasus Sistem Pengelolaan Daya Listrik PT.VALE PLTA Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)*.** Dibawah bimbingan Suparman Abdullah dan Sultan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik vertikal antara pemerintah daerah Luwu Timur dengan masyarakat Desa Laskap yang terjadi pada bulan Desember 2012-bulan Maret 2013, Konflik dipicu oleh tidakadanya transparansi kebijakan pengelolaan hasil pendapatan daerah dari sektor ibah listrik atas kesepakatan pemberian ibah listrik terhadap pembangunan PLTA Karebbe oleh pemilik perusahaan tambang nickel PT. VALE yang telah tertuang dalam MOU tanggal 31 Agustus 2006.

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah bagaimana kronologis konflik (Perlawanan) yang terjadi antar Pemerintah daerah dan Masyarakat Desa Laskap, bagaimana bentuk-bentuk konflik (Perlawanan) yang terjadi antar pemerintah daerah dan masyarakat Desa Laskap dan bagaimana bentuk resolusi terhadap konflik (Perlawanan) yang terjadi antar pemerintah daerah dan masyarakat Desa Laskap.

Adapun salah satu manfaatnya yaitu manfaat akademis, penelitian ini diharapkan sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu penelitian, jurusan sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas hasanuddin. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif. Hasil dalam penelitian ini, menemukan gambaran kronologis konflik bahwa konflik (perlawanan) yang terjadi melibatkan masyarakat desa laskap yang kemudian berkembang melibatkan sebagian masyarakat kecamatan malili dan kemudian dikawal oleh Forum Masyarakat Pemberdayaan Kecamatan malili yang mempertengahkan masalah transparansi kebijakan alokasi penggunaan anggaran pendapatan daerah dari sektor ibah listrik. Bentuk konflik (perlawanan) yang terjadi adalah berawal dari pertengtangan, kemudian berujung aksi protes yang diwarnai aksi unjuk rasa yang tuntutananya adalah peme\berian listrik gratis, kemudian aksi anarkisme dan berakhir pada aksi pembubaran paksa oleh aparat kepolisian sampai konflik yang terjadi mereda. Dari konflik (perlawanan) tersebut terdapat gambaran resolusi yang ditemukan yakni dari masyarakat menawarkan akan adanya subsidi listrik dan program 9 desa binaan dari alokasi pendapatan daerah dari sektor ibah listrik sedangkan resolusi yang diberikan pemerintah adalah pengalokasian ke anggaran pembangunan infrastruktur kabupaten.

## ABSTRACT

**Arbin, E411 11 255. *The Resistance of LASKAP Community (A Case of Electrical Power Management of PT. VALE PLTA Karebbe, Laskap Village, Malili Subdistrict, East-Luwu Regency).***

This study is based on the vertical conflict between the local governments of East Luwu with Laskap's community that occurred in December 2012 - March 2013. Conflict was triggered by the lack of transparency of the management policy of local revenue in electrical grant on agreement of electrical grant to PLTA Karebbe by nickel owner of PT. VALE which has been contained in MOU dated 31 August 2006.

Based on the above problems, the purpose of this study is how the chronological of conflict (resistance) that occurs between the local government and the Laskap's community, how the forms of conflict (resistance) that occurs between the local governments and Laskap's community and how the resolution of conflict (resistance) that occurs between the local governments and Laskap's community.

As one of the usefulness of this study was academic usefulness, this study is expected as a reference in the development of research science, Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The method used of this was qualitative approach with descriptive studies. The results of study indicates the chronological of conflict that (resistance) that occurred involving Laskap's community and evolved involve some community of Malili districts and then supported by empowerment Community Forum of Malili that opposed to the transparency policy of local revenue allocation in electrical sector. Forms of conflict (resistance) that occurs is sourced from the opposition, and then protests and demand free electricity, then the action of anarchism and ended in the forced action by the police to the conflict ended. There is resolution found in this conflict (resistance) i.e the community offering the electricity subsidy and assistance 9 village of the allocation of local revenue from electricity sector grant while the resolution given by the government is allocating to the infrastructure development budget of district.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	i
SAMPUL .....	ii
HALAMAN JUDUL PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PENERIMAAN EVALUASI .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Masyarakat .....	8
B. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah .....	9
C. Tinjauan Tentang Konflik .....	10
D. Tinjauan Tentang Tindakan Sosial .....	21
E. Tinjauan Gerkan Sosial .....	2
F. Tinjauan Tentang Resolusi Konflik .....	24
G. Tinjauan Tentang Sistem Pengelolaan Sarana Listrik PT.VALE .....	30
H. Kerangka Konseptual .....	37

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Strategi penelitian .....	40
B. Waktu, Lokasi dan Fokus penelitian .....	41
C. Tipe dan Dasar penelitian .....	42
D. Informan .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	46

### BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	48
B. Keadan Geografis Desa Laskap .....	50
C. Keadaan Demograpi Desa Laskap .....	53

### BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan .....	57
B. Kronologis Konflik (Perlawanan ) Yang Terjadi Antar Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Desa Laskap .....	60
C. Bentuk-Bentuk Konflik (Perlawanan) Yang Terjadi Antar Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Desa Laskap .....	75
D. Bentuk Resolusi Terhadap Konflik (Perlawanan) Yang Terjadi Antar Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Desa Laskap	79

### BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

DAFTAR PUSTAKA .....	89
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	91
-------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT PENULIS	
------------------------	--

## DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
1.1	letak geografis desa laskap	
2.1	wilayah administratif desa laskap	
3.1	sarana dan prasarana desa laskap	
4.1	jumlah penduduk menurut jenis kelamin desa lasakap	
5.1	tingkat perbandingan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	
6.1	tingkat kesejahteraan penduduk desa laskap	
7.1	persentase tingkatan mata pencaharian masyarakat desa laskap	
8.1	matrix informant	

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Nama Lampiran
I	Dokumentasi
II	Surat Keterangan Pembacaan Kwh
III	Gambar Ketiga Plta Perusahaan Pt.Vale Beserta Gambar Ketiga Danau Sebagai Sumber Air Pembangkit Listrik
IV	Foto Gambar Gardu Induk
V	Pedoman Wawancara
Vi	Undang-undang ketenagalistrikan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Indonesia sebagai negara demokrasi, suara rakyat merupakan kebutuhan wajib dalam menjalankan pemerintahan negara. Namun, karena sangat banyaknya populasi penduduk Indonesia, bentuk demokrasi langsung sangat tidak efisien dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia juga termasuk negara yang jumlah penduduknya paling tinggi yang mendiami negara tersebut oleh karena itu kesuluruhan penduduk diatur dengan kebijakan sistem demokrasi langsung.

Pada sistem demokrasi langsung, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi, pada akhirnya Demokrasi perwakilan merupakan alternative yang terbaik, masalah sosial, dan kebutuhan masyarakat disampaikan langsung oleh rakyat kepada wakil rakyat sesuai dengan bidang-bidang tertentu, kemudian pada akhirnya para wakil rakyat merumuskan dan menentukan suatu kebijakan yang sejatinya mendukung pembangunan pada kehidupan masyarakat.

Seringkali dalam mewujudkan Demokrasi perwakilan di Indonesia, suara rakyat yang disampaikan oleh para wakil rakyat terkadang kurang bisa mengartikan isi hati sebagian rakyat.

Indonesia). dan pada akhirnya, masyarakat melakukan pertentang ataupun melakukan tindakan melawan kebijakan pemerintah yang kurang bias mengartikan keinginan masyarakat .

Apabila dilihat dari realitas yang berkembang saat ini, konflik yang melibatkan pemerintah dengan masyarakatnya merupakan sebuah konflik yang sudah membudaya di kehidupan masyarakat dalam berjalannya roda pemerintahan di negara ini. setiap saat dapat kita jumpai di kota-kota besar kerap terjadi sebuah konflik yang melibatkan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat tertentu, salah satu yang menjadi hal memicu timbulnya konflik tersebut adalah ketika para pemerintah daerah membuat dan mengimplementasikan kebijakan politik yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakatnya .

Kebijakan politik yang kurang baik menurut masyarakat mengakibatkan masyarakat melakukan perlawanan serta pertentangan dengan pemerintah daerah dan forum musyawarah yang terkadang tak menuai solusi. maka dari itu, melakukan pertentangan atau perlawanan dengan pemerintah merupakan salah satu jalan yang ditempuh apabila kebijakan politik kontradiksi dengan kebijakan politik oleh pemerintah antara keinginan masyarakat.

Seperti halnya konflik yang terjadi di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di Kecamatan Malili, Desa Laskap, pada bulan Desember 2012-Maret 2013.



Berdasar pada studi pendahuluan dengan mewawancarai seseorang masyarakat Desa Laskap pada bulan Januari 2015, Bahwa terdapat konflik antar pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap. Yang mempermasalahkan masalah kebijakan politik pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor ibah listrik.

Konflik tersebut, diakibatkan oleh adanya pendapatan daerah dari sektor penjualan ibah listrik yang dijual ke PLN melalui perusahaan PT.VALE kemudian hasil penjualan tersebut dikelola oleh pemerintah daerah sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati oleh ketiga element tersebut.

Daya Listrik tersebut berasal dari pembangunan PLTA Karebbe didesa Laskap yang mempunyai daya tampung listrik sebesar 95 MW dan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah dan perusahaan, listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik PLTA tersebut sebagian diibahkan kepada masyarakat kabupaten Luwu Timur dan sebagai bentuk penerapan dari CEO atau tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.

Tujuan lain dari pembangunan bendungan adalah menambah kekuatan distribusi listrik keperusahaan, menambah kekuatan 2 PLTA sebelumnya yang pada dasarnya KeTiga PLTA tersebut memiliki masing-masing bendungandan sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat sekitar bantaran sungai yakni ketakutan masyarakat akan bendungan sebelumnya tidak mampu menahan debit air dari KeTiga danau yang ada di daerah tersebut.

Di balik semua tujuan tersebut terdapat fakta bahwa pihak Perusahaan PT.VALE telah memberikan manfaat dari bendungan PLTA Karebbe tersebut berbentuk ibah pemberian daya listrik sebanyak 3 Megawatt kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur melalui pemerintah daerah atas pembangunan bendungan PLTA Karebbe.

Pada dasarnya pemberian tersebut di harapkan akan bermanfaat bagi ke 4 wilayah pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.Namun masyarakat menganggap bahwa hal tesebut belum mendapat model kebijakan yang efektif dalam bentuk model kebijakan dari pemanfaatan pemberian ibah daya listrik tersebut, dalam hal ini model kebijakan dari pengalokasian pemberian ibah listrik tersebut yang dibentuk pemerintah daerah tidak transparan dimata masyarakat.

Permasalahan lain, yang di temukan bahwa kapasitas listrik yang di berikan tetap tidak di rasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar dankapasitas listrik yang di berikan di jual ke pihak PLN dan sebagai bahan untuk memenuhi permintaan kebutuhan daya listrik masyarakat.

Dampakdarimasalah tersebut, mengakibatkan munculnya kekecawaan pada masyarakat dikarenakan masyarakat menganggap hilangnya fungsi pemerintah daerah, dalam hal ini merupakan element penting dalam membuat dan memberikan kebijakan yang efektif terhadap permasalahan di tubuh kepermerintahannya. Dampaknya adalah menimbulkan pertentangan yang dilakukan masyarakat menuntut kebijakan mengatasi hal yang dipermasalahkan.

Isu-isu sosial yang juga menyebabkan konflik ini semakin kuat adalah ketika para masyarakat yang sebagian besar digagas oleh masyarakat bantaran

sungai kecamatan Malili, yakni masyarakat Desa Laskap memikirkan bahwa apabila bendungan yang telah dibangun mengalami kerusakan dan pastinya menyebabkan banjir bandang efeknya sebagian besar yang terkena hanya pada masyarakat di sekitar bantaran sungai oelh karena itu pada awalnya masyarakat menuntut adanya asuransi bagi masyarakat.

Namun ketika masyarakat menemukan masalah seperti yang diterangkan pada paragraf sebelumnya, maka masyarakat malah mempermasalahkan hal tersebut, masyarakat Desa Lasakap menginginkan kebijakan politik yang efektif terhadap penyelesaian masalah pembebanan biaya listrik tersebut yang pada akhirnya berujung pada konflik dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena konflik yang di jelaskan di atas dengan beberapa masalah sosial yang menguatkannya Maka, atas dasar hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “*STUDI KONFLIK DI DESA LASKAP (Kasus sistem pengelolaan sarana listrik PT.VALE, PLTA Karebbe Desa Laskap, Kecamatan Malili,Kabupaten Luwu Timur)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian diatas,maka permasalahan yang di rumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologis konflik (Perlawanan) yang terjadi antar Pemerintah daerah dan Masyarakat Desa Laskap?

2. Bagaimana bentuk-bentuk konflik (Perlawanan) yang terjadi antar pemerintah daerah dan masyarakat Desa Laskap?
3. Bagaimana bentuk resolusi terhadap konflik (Perlawanan) yang terjadi antar pemerintah daerah dan masyarakat Desa Laskap?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Menggambarkan kronologis terjadinya konflik (Perlawanan) antar Pemerintah daerah dan masyarakat Desa Laskap
- b. Menggambarkan bentuk-bentuk konflik (Perlawanan) yang terjadi antar Pemerintah daerah dan masyarakat Desa Laskap
- c. Menggambarkan resolusi dari konflik (Perlawanan) yang terjadi antar Pemerintah daerah dan Masyarakat Desa Laskap

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Manfaat akademis**

Penelitian ini diharapkan Sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu penelitian, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai bahan pembelajaran mahasiswa dalam menganalisis masalah konflik sampai pada menggambarkan resolusi konflik dari sebuah konflik.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan Sebagai salah satu masukan dalam menganalisis masalah yang terkait dan Sebuah bahan pemikiran masyarakat dalam mengetahui perkembangan konflik tersebut.

c. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat merupakan Sebagai salah satu alat dalam menganalisis suatu masalah sosial dalam bentuk ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan yang di gunakan untuk menambah keberagaman ilmu sosiologi dalam menangani masalah sosial

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Tentang Masyarakat**

Dalam objek kajian, sosiologi mengkaji tentang manusia dari aspek sosialnya yang sering disebut masyarakat, dan hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial (*social animal*) (Sanderson,43,2010), yang perlu berinteraksi dan hidup bersama dalam menjalani kehidupan mereka, serta saling membutuhkan satu sama lainnya dalam mencapai tujuan, maka dari itu manusia harus berkolompok dan terorganisir yang sering disebut masyarakat.

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton ( Soerjono Soekanto, 2006: 22).

Masyarakat dalam interaksinya, menimbulkan produk-produk interaksi yang beranekaragam, seperti nilai-nilai sosial dan norma yang dianut dalam sebuah masyarakat tertentu secara individu maupun kelompok, dan termasuk juga pola hubungan dalam masyarakat. Berdasarkan kesatuannya, masyarakat terbagi

menjadi masyarakat desa dan masyarakat kota, oleh karena itu, masyarakat adalah manusia yang berinteraksi satu sama lain yang terikat atas aturan dan norma tertentu yang bersifat kontinu dan sifatnya terikat oleh rasa identitas bersama.

Nilai dan norma sangat berperan penting bagi interaksi dalam sebuah masyarakat, nilai dan norma merupakan tata kelakuan yang harus dilakukan manusia dalam masyarakat untuk berhubungan dengan manusia lain. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, patut, layak, pantas, yang keberadaannya dicita-citakan dan diinginkan bersama, sedangkan norma adalah pedoman atau petunjuk yang mengarahkan perilaku manusia didalam sebuah masyarakat, oleh karenanya baik buruknya pola interaksi dalam masyarakat tergantung dari sistem nilai dan norma yang dianut oleh setiap manusia dalam masyarakat tersebut.

## **B. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah**

Dalam sistem pemisahan kekuasaan Negara Republik Indonesia yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, pemerintah termasuk dalam bagian Legislatif yang secara umum memiliki fungsi menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Legislatif itu sendiri termasuk Presiden, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Namun berdasarkan klasifikasinya, pemerintah terbagi atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang terlingkup oleh pemerintah suatu negara.

Pada hakikatnya, pemerintahan daerah muncul dikarenakan adanya sistem otonomi daerah yang disebabkan oleh sistem sentralisasi yang dianut oleh pemerintah terdahulu dirasakan belum mampu menjalankan pemerataan kebijakan pemerintahan dalam kemaslahatan masyarakat, oleh karena itu dibentuklah sistem Desentralisasi yang sejatinya bagian dari Otonomi Daerah

Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia)).

### **C. Tinjauan Tentang Konflik**

#### **1. Pengertian Konflik**

Konflik berasal dari kata *Configere* yang berarti saling memukul, Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. (Pranoto, 2006).

Konflik di latar belakang oleh perbedaan ciri-ciri yang di bawa individu dalam suatu interaksi, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, nilai dan norma dan lain sebagainya.



Namun demikian, konflik atau pertentangan merupakan mekanisme yang mendorong adanya suatu perubahan, yang berpengaruh efektif terhadap seluruh tingkat realitas sosial, bahkan pada tingkat individual dan organisasi-organisasi sosial.(Tri Pranoto,2006). Konflik juga di definisikan sebagai suatu proses sosial yang di lakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai kekerasan.

Menurut Dahrendorf, konflik sosial mempunyai sumber structural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antarkelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekerasan yang ada.

Menurutnya, konflik sosial dapat terjadi karena;

- 1) Setiap masyarakat dalam segala hal mau tidak mau harus tunduk pada proses perubahan ; perubahan sosial yang terjadi di mana saja.
- 2) Setiap masyarakat dalam segala hal memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik
- 3) Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahan.
- 4) Setiap masyarakat di dasarkan atas penggunaan kekuasaan oleh sebagian anggotanya terhadap anggota lain.

Dalam negara hukum, konflik baik yang bersifat individual atau sosial harus diselesaikan melalui jalan hukum. Itu berarti sebuah penolakan terhadap jalan kekerasan. Hukum berarti aturan main yang tidak hanya bersifat formal tetapi lebih daripada itu, ia mengandung nilai-nilai keadilan.(Tri Pranoto,2006).

Hukum itu kemudian menjadi norma hukum objektif yang menjadi dasar bagi tindakan negara. Ia mengatur hubungan antar negara dengan warga negara dan hubungan antara badan-badan negara hukum yang di bentuk melalui proses yang memenuhi syarat legitimasinya itu di jalankan oleh kekuasaan yudisial. (Tri Pranoto,2006).

Artinya, kekuasaan yudisial meliputi wewenang penyidikan oleh polisi,wewenang penuntutan oleh jaksa penuntut umum,dan pengadilan hakim,polisi,jaksa dan hakim inilah yang merupakan sub-sistem yang membentuk sistem hukum peradilan.(Tri Pranoto,2006).

Menurut Koentjaraningrat, menegaskan konflik sudah menjadi bagian Berbagai lini kehidupan manusia,baik kehidupan pribadi maupun kehidupan kelompok. Konflik dapat di kelompok menjadi empat, yakni:

- 1) Konflik Batin (*mental conflict*) yakni konflik gagasan dan keinginan dalam diri individu
- 2) Konflik Kebudayaan (*cultural conflict*),yakni persaingan antara warga dua kolektif sosial yang mempunyai kebudayaan yang hampir beragam

- 3) Konflik Kelas (*class conflict*), yakni pertentangan antar golongan dan masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan,dan
- 4) Konflik Peran (*role conflict*), yakni konflik peranan yang di pegang oleh individu yang di laksanakan secara tidak konsisten.

## **2. Sebab-Sebab Konflik**

Menurut Seojono Seokanto, suatu konflik atau pertentangan timbul dalam masyarakat disebabkan oleh faktor, antara lain:

### **1. Perbedaan Individu**

Identitas diri yang berbeda dengan manusia sebagai individu memiliki perasaan,gagasan,pendirian,ide,harga diri serta individu lain yang akan melahirkan bentrokan-bentrokan.

### **2. Perbedaan latar belakang kebudayaan**

Perbedaan kepribadian antarindividu tergantung pada pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian mereka. Seseorang secara sadar maupun tidak sadarkan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya.

### **3. Perbedaan kepentingan**

Perbedaan kepentingan antarindividu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan atau konflik. wujud kepentingan dapat bermacam-macam, ada kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Sebagai contoh seorang buruh menginginkan upah tinggi, sedangkan majikannya menginginkan sebaliknya.

### **4. Perbedaan nilai**

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi pada struktur sosial, perubahan yang tidak sesuai dengan norma dan harapan individu atau masyarakat dapat memicu konflik dalam masyarakat.

Konflik dalam masyarakat secara umum dikarenakan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan. Setiap kelompok masyarakat pada dasarnya mempunyai akar kepentingan yang selalu tidak sama di antara anggotanya. Oleh sebab itu kelompok masyarakat selalu ada dalam situasi konflik dikarenakan tidak meratanya perubahan dan kesempatan yang ada.

### **3. Jenis-jenis konflik**

Dalam hal jenis, konflik dalam kehidupan sosial yang kerap terjadi adalah konflik vertikal dan konflik horizontal

#### **1. Konflik Vertikal**

Konflik vertikal atau biasa juga disebut konflik keatas yang dimaksud adalah konflik elite dengan massa, elite disini merupakan

para penguasa yang memegang kendali kekuasaan dan penentu kebijakan juga dapat diartikan pada konteks kekiniaan adalah pemerintah sedangkan yang dimaksud massa adalah rakyat (Suadi dkk., 2003: 41-43).

## **2. Konflik Horizontal**

Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi diantara massa itu sendiri. Konflik horizontal secara umum memiliki dua jenis, (1).Konflik antara agama, khususnya konflik antara kelompok-kelompok agama islam dan kelompok agama nasrani,konflik jenis ini pernah ada seperti, konflik ambon,konflik poso dan beberapa daerah lainnya. (2).Konflik antar suku, khususnya konflik antara suku seperti suku jawa dengan suku-suku diluar pulau jawa itu sendiri,suku madura dengan suku melayu di kalimantan barat.(suadi dkk.,2003: 41-43).

## **4.Bentuk-Bentuk Konflik**

Konflik atau pertentangan dalam masyarakat (konflik horizontal) dapat mempunyai bentuk khusus antara lain. (Tri Pranoto, 2006)

### **1. Pertentangan Pribadi**

Pertentangan pribadi adalah pertentangan yang terjadi secara emosi dari seorang individu. Pertentangan ini berasal dari diri orang tersebut, terutama dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya, ketika anda berhadapan dengan sebuah masalah yang menyangkut masa depan anda seperti memilih jurusan di perguruan tinggi.

## **2. Pertentangan Antar Individu**

Pertentangan yang terjadi antarseseorang dengan orang lain karena ada perbedaan kepentingan terhadap suatu hal yang sama misalnya, seorang ayah yang memarahi anaknya yang berbuat salah, tetapi siibu melindungi anaknya.

## **3. Pertentangan Antar Kelompok**

Artinya peraturan yang dikeluarkan oleh kelompok tertentu menimbulkan kerugian pada kelompok lain misalnya, Departemen pekerjaan umum memutuskan pembuatan jalan baru guna mengatasi kemacetan lalu lintas, akibat keputusan tersebut terdapat tiga buah sekolah dasar yang harus di bongkar yang akhirnya diprotes oleh masyarakat.

## **4. Pertentangan Rasial**

Sumber pertentangan rasial adalah perbedaan ciri-ciri fisik misalnya, pertentangan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih Amerika.

## **5. Pertentangan Antar Kelas-Kelas Sosial**

Pertentangan yang terjadi antara kelas-kelas sosial di sebabkan oleh perbedaan kepentingan. Salah satu contoh dari pertentangan ini adalah perbedaan kepentingan antara pengusaha dan buruh. Seorang buruh menuntut upah sesuai dengan hasil kerjanya.

## **6. Pertentangan Politik**

Biasanya pertentangan ini menyangkut antar golongan-golongan dalam suatu masyarakat, maupun antar negara-negara kedaulatan. Konflik ini terjadi dikarenakan adanya kepentingan yang sama dalam bidang politik antargolongan tersebut.

## **7. Pertentangan Yang Bersifat Internasional**

Hal ini di sebabkan perbedaan-perbedaan kepentingan yang mengimbas kedalam kedaulatan Negara, mengalah berarti mengurangi kedaulatan negara dan itu berarti kehilangan muka dalam forum internasional.

## **5. Akibat dari Konflik**

Konflik sebagai proses sosial mempunyai fungsi positif dan negatif bagi masyarakat. Konflik dalam bentuk lunak dan dapat di kendalikan, misalnya dalam acara seminar atau diskusi ilmiah, berkembang beberapa pendapat yang berbeda dan di pertahankan oleh pihak pihak terkait, (Tri Pranoto, 2006).

Pertentangan antar beberapa pendapat akan memunculkan pendapat baru yang dapat di terima oleh pihak terkait, konflik bersifat positif sepanjang konflik tersebut tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan social, (Tri Pranoto, 2006).

**1. Akibat dari konflik yang bersifat positif adalah;**

- a. Bertambahnya solidaritas intern kelompok,
- b. Munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai situasi konflik, dan
- c. Munculnya kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan seimbang.

**2. Akibat dari konflik yang bersifat negative adalah;**

- a. Retaknya persatuan kelompok
- b. Jatuhnya korban manusia dan hilangnya serta hancurnya infrastruktur
- c. Perubahan kepribadian individu
- d. Munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah.

**6. Dinamika Konflik**

Analisis dinamika melihat pada penahapan konflik, penahapan konflik melihat pada bagaimana model tindakan individu atau kelompok yang sedang berkonflik, menurut Wehr dan Bartos ( 2003) melihat dinamika konflik pada tingkatan kekerasan atau *coercive action*. Sedangkan menurut Fisher (2001: 19), menjelaskan beberapa dinamika konflik berawal dari pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik



### **1. Pra-Konflik**

Merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

### **2. Konfrontasi**

Pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.

### **3. Krisis**

Krisis ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.

### **4. Akibat**

Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian.

## 5. Pasca-Konflik

Akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik. (Susan, M.A, 2009; 94-96)

## 7. Teori Konflik ( Ralf dahrendrof )

Ralf Dahrendorf adalah sosiolog yang mencoba menjelaskan konflik dari teori tentang stratifikasi sosial bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas yakni kelas pemilikan kewenangan ( *authority* ), yaitu kelas yang memiliki kewenangan ( *dominan* ) dan kelas yang tidak memiliki kewenangan ( *subjesi* ).

Menurut teori ini, terintegrasinya masyarakat karena adanya dominasi kelompok-kelompok kepentingan yang menguasai masyarakat banyak, sedangkan teori pemeretaan menjelaskan bahwa, konflik dapat muncul apabila dalam sebuah masyarakat terdapat sistem pembagian kewenangan yang tidak merata.

Teori konflik Ralf dahrendrof menjelaskan bahwa;

- 1) Setiap kehidupan sosial selalu berada dalam proses perubahan
- 2) Setiap kehidupan sosial selalu terdapat konflik didalam dirinya sendiri

- 3) Setiap element dalam masyarakat memberikan sumbangsi terhadap adanya perubahan dan konflik
- 4) Dalam kehidupan sosial, masyarakat akan terintegrasi diatas dominasi para pemegang kewenangan.

#### **D. Tinjauan Tentang Tindakan Sosial**

Tindakan sosial masyarakat ditimbulkan karena gejala psikologi massa dalam komunikasi yang sporadis seperti dalam teori S-R ( stimulus-Respons). Karena adanya suatu rangsangan (stimuli) serta pesan yang telah tersampaikan atau diterima oleh sekelompok orang karena adanya respon atau tanggapan .

##### **1. Teori Tindakan Sosial MARX WEBER**

Menurut Weber, Tindakan Sosial adalah tindakan yang dapat berupa tindakan yang nyata diarah kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perorangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Weber membagi tindakan sosial kedalam empat tipe sebagai berikut;

##### **1. Tindakan Rasional Instrumental**

Tindakan ini dilakukan oleh seseorang dengan memperhutingkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai.

## **2. Tindakan Rasional Yang Berorientasi Pada Nilai**

Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh sipelaku

## **3. Tindakan Tradisional**

Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya

## **4. Tindakan Afektif**

Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal budi.

## **E. Tinjauan Gerakan Sosial**

### **1. Teori Gerakan sosial ( EMILE DURKHEIM )**

Emile durkheim adalah seorang sosiolog yang lebih memberikan perhatian diluar pemikiran konflik Marx dan Weber tentang konflik, walaupun pada akhirnya secara khusus durkheim tidak secara terang menjelaskan tentang konflik akan tetapi dari sejumlah pemikirannya dapat dianalisis bahwa konflik durkheim adalah konflik anatara manusia dan sistem.

Sejatinya Durkehim lebih menekankan pada social fact atau fakta sosial, segala hal yang berada diluar dan memaksa terhadap tindakan-tindakan individu Individu bergerak atas dasar nilai sosial yang ada di eksternal mereka, diluar dirinya dan sifatnya memaksa.

Menurut Gidden, ada dua makna yang berkaitan dengan fakta sosial Durkheim antara lain;

1. Tiap orang dilahirkan dalam masyarakat yang terus berkembang dan telah mempunyai organisasi atau struktur pasti serta mempengaruhi kepribadiannya.
2. Fakta- fakta sosial merupakan hal yang berada diluar bagi individu dalam arti bahwa setiap individu dimanapun hanyalah merupakan suatu unsur tunggal dari totalitas pola hubungan yang membentuk masyarakat.

Dalam konsep sosiologi Durkheim, terdapat pembagian masyarakat yakni masyarakat mekanik dan organik, masyarakat mekanik mempunyai conscience collective, kesadaran umum yang mendasari tindakan-tindakan individu yang bersifat kolektif dan juga berupa moral bersama yang koersif pada setiap anggota-anggotanya.

Sedangkan pada masyarakat organik, cenderung memiliki sifat kesadaran organis yang sifatnya kompleks, artinya individu bertindak atas dasar fungsi kebutuhan, kesadaran organis menjadi dasar perkembangan masyarakat modern. pandangan durkheim mengenai gerakan sosial yang kemudian diartikan oleh Turner adalah social current menjadi social movement (Turner, 1998:92 ).

Menurut Durkheim analisis gerakan sosial adalah terkonsep pada kesadaran kolektif yang mengikat individu-individu melalui berbagai simbol dan norma sosial. Artinya kesadaran kolektif menurutnya mampu memunculkan gerakan-gerakan sosial dan berujung konflik.

## **F. Tinjauan tentang Resolusi konflik**

### **1. Pengertian Rosolusi Konflik**

Resoslusi konflik adalah bagaimana mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak yang berkonflik, dalam kajiannya usaha yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian adalah pengelolaan konflik ( conflict management ) dan tata kelola konflik ( conflict governance), sebagai berikut;

#### **a. Conflict Management**

Conflict management, bertujuan mencegah konflik menuju tahap kekerasan, baik langsung dan terstruktur, terutama pada konflik langsung. Ruben stein menyatakan bahwa, “conflict menegement bertujuan memoderasi atau memberadabkan efek-efek konflik tanpa perlu menangani akar konflik dan sebab-sebanya” (ruben benstein,1996;1). Teori conflict menegement menjelaskan bahwa semua konflik tidak perlu diselesaikan tetapi mempelajari bagaimana mengelola konflik dapat mengurangi eskalasi konflik kekerasan.

Menurut carpenter dan kennedy (1988;4), menjelaskan tantangan dalam menejement konflik adalah bukan menghilangkan konflik akan tetapi mengatasi perbedaan seproduktif. Dari kesimpulan para pandangan diatas, bahwa conflict menegement adalah upaya pencegahan konflik dari kekerasan tanpa harus mencapai pemecahan masalah.

Otomar j. Bartos dan Pul Wehr dalam bukunya using conflict theory ( 2003), berpendapat bahwa, conflict management adalah masalah bagaimana menjadi

orang yang ahli ( ‘a skilled conflict actor “), kemudian melihat pada aspek perilaku konflik (“conflict behavior”) untuk meningkatkan keahlian pengelolaan konflik.

#### **b. Democratic Conflict Governance**

Democratic conflict governance bisa dimengerti sebagai situasi dinamisasi hubungan antara berbagai aktor dan lembaga dalam tata kelola unsur-unsur konflik dalam suatu ruang politik inklusif ( inclusive political arena) yang ditandai oleh aktivitas mempersuasi, memusyawarakan dan mengimplementasikan kebijakan perdamaian yang telah tercapai. Kebijakan perdamaian merupakan suatu hasil kebijakan penanganan konflik yang dicapai dari hasil musyawarah yang harus dilaksanakan oleh para pelaku konflik.

Menurut Rondinelli (2007,15-16), menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut harus diawali dari pembangunan ulang pemerintahan. Ada tiga tahap yang harus dialankan;

1. Dalam periode rekonstruksi awal pasca konflik, pemerintah harus memperhatikan isu-isu mendesak dan penting dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan (maintaining peace and security), mendirikan kembali pemerintahan membangun kembali ekonomi, membangun kembali ekonomi, dan mengintegrasikan kembali masyarakat.

2. Pada masa transisi, pemerintah perlu menstabilkan ekonomi negara (wilayah, penulis) dan struktur pemerintahan (goverence strukture ) dan pelayanan sipil harus bergerak maju mewujudkan tipe-tipe fungsi yang biasanya ada dalam sitem ekonomi dan politik yang stabil.
3. Pada periode pemerintahan yang telah stabil, pemerintah memperhitungkan fungsi-fungsinya, dan kualitas pelayanan sipil harus mampu mendorong pemabangunan ekonomi dan tata pemerintahan yang terlembagakan dalam sistem politik yang mapan, oleh karena secara umum, Rodinelli berpendapat bahwa govermance dalam pengertiannya adalah suatu pelayanan publik oleh pemerintahan( susan,M.A,2009,128-129).

Secara umum, resolusi konflik yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik sebagai berikut;

1. **Negosiasi** adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga diartikan suatucara penyelesaian sengketa secaradamai melalui perundingan antara pihak yang berperkara. Dalam hal ininegosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatanpada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yangsama maupun yang berbeda.



2. **Konsiliasi (Conciliation)**, Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal:

- a. Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain,
- b. Lembaga harus bersifat monopolistik, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian,
- c. Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik,
- d. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis.

Konsiliator nantinya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

3. **Mediasi (Mediation)**, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka

alami. bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.

Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator. Oleh karena itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur, antara lain,

1. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, putusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

4. **Arbitrasi (Arbitration)**, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbitrer.

## **2. Pengaturan konflik melalui lembaga “Konsiliasi” ( Ralf Dahrendorf)**

Dalam pengaturan konflik, penulis menjelaskan melalui proses konsiliasi, konsiliasi merupakan pengaturan konflik melalui lembaga-lembaga yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan proses pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tentang persoalan yang dipertentangkan. Pengaturan konflik konsiliasi akan berjalan efektif jika memenuhi empat faktor;

1. Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat otonom yang berkewenangan membuat keputusan tanpa campur tangan dari pihak luar, Contoh lembaga peradilan yang harus independen dalam memutuskan suatu perkara, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak luar
2. Lembaga harus bersifat monopolistik dalam hal kedudukan, artinya fungsi lembaga sejatinya sebagai pengatur konflik.
3. Lembaga harus memiliki peranan yang bersifat mengikat, sehingga para pelaku yang berkonflik merasa terikat dengan aturan dari lembaga tersebut.
4. Lembaga harus bersifat demokratis, artinya mendengar aspirasi dan memberikan kebebasan berpendapat bagi para pelaku yang mengalami konflik (Setiadi,dkk,386-387).

Kefektifan pengaturan konflik bergantung oleh tiga hal;

1. Kedua belah pihak sadar akan dirinya sedang dalam situasi berkonflik, perlu melaksanakan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran antar pihak yang bertikai

2. Yang terlibat konflik adalah organisasi kelompok kepentingan, artinya jika konflik sosial tersebut terorganisasi dengan jelas, maka pengaturan akan lebih efektif.
3. Adanya suatu permainan ( rule of the game ) yang disepakati dan ditaati bersama, sebab aturan permainan itu akan menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok yang berkonflik.(Setiadi,385-387).

#### **G. Tinjauan Tentang Sistem Pengelolaan Sarana Listrik PT. VALE**

Sistem sarana listrik sangat memegang peranan penting dalam semua aspek dalam dunia industri, sehingga untuk mencapai hasil yang baik dari sebuah penggunaan listrik maka salah satunya dibutuhkan distribusi listrik yang baik dan ramah pemakaian. Salah satunya adalah sebuah perusahaan yang bernama PT.VELE, PT.VALE merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri yakni industri tambang penghasil nikel yang pada dasarnya memiliki sebuah pabrik, untuk menghasilkan produksi tambang yang baik salah satunya adalah kebutuhan akan distribusi yang baik pula guna mendukung usaha peningkatan hasil produksi nikel PT.VALE .salah cara perusahaan PT.VALE untuk memperbaiki distribusi listrik sekaligus mencukupi kebutuhan listrik pabrik, yakni dengan dibangunkannya Tiga PLTA ( Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang berada distekitar pabrik yang memiliki masing-masing bendungan, adapun pembangkit listrik yang dibangun perusahaan PT.VALE adalah PLTA Larona, PLTA Balambano, dan PLTA Karebbe,berikut penjelasan mengenai ketiga pembangkit listrik tersebut;

## **1. PLTA LARONA**

PLTA Larona memiliki tiga unit turbin dan telah beroperasi sejak tahun 1979 dengan produksi daya listrik rata-rata (continuous power) sebesar 165 megawatt.

### **1. Bendungan**

- Tipe : Rock Fill Concrete Face
- Maksimum Storge : 10 juta meter kubik
- Panjang Puncak : 550 meter
- Elevasi Puncak : 322,2 meter diatas permukaan laut

### **2. Kanal**

- Panjang : 6, 969 meter
- Lebar : 14,4 meter
- Debit : 148 meter kubik per detik

### **3. Turbin**

- Tipe : Francis Vertical Shaft
- Produsen : Hitachi/Zulzer
- Putaran : 272,7 rpm
- Head : 140 – 142,3 meter
- Diameter : 2849,6 millimeter
- Kapasitas : 65,44 – 67,05 megawatt

### **4. Generator**

- Tipe : Umbrella

- Produsen : GE-Kanada
- Putaran : 272,7 Rpm
- Kapasitas : 85 MVA
- Tegangan : 11.000 volt
- Jumlah Kutub : 22 ea

## **2. PLTA BALAMBANO**

Memiliki 2 turbin dengan produksi daya listrik rata-rata sebesar 110 megawatt. Dibangun pada 1995 dan beroperasi 1999.

### **1. Bendungan**

- Tipe : Roller Compacted concret (RCC)
- Maksimum Storge : 31,5 juta meter kubik
- Panjang Puncak : 350 meter
- Elevasi Puncak : 167 meter diatas permukaan laut

### **2. Pelimpah**

- Kapasitas : 3.750 meter kubik per detik
- Ukuran : 8.15,076 meter

### **3. Turbin**

- Tipe : Francis Vertical Shaft
- Produsen : GE-Kanada
- Putaran : 214,3 rpm
- Head : 83,5 – 86,5 meter
- kapasitas : 67,7-68,5 megawatt

#### 4. **Generator**

- Tipe : Umbrella
- Produsen : GE-Kanada
- Putaran : 214,3 Rpm
- Kapasitas : 80 MVA
- Tegangan : 11.000 volt
- Jumlah Kutub : 28 ea

### 3. **PLTA KAREBBE**

Memiliki 2 turbin dan telah beroperasi sejak oktober 2011 dengan produksi daya listrik rata-rata sebesar 90 megawatt.

#### 1. **Bendungan**

- Tipe : Low Cement Conventional Concrete (LCVC)
- Maksimum Storge : 13, 58 juta meter kubik
- Panjang Puncak : 202 meter
- Elevasi Puncak : 79,5 meter diatas permukaan laut

#### 2. **Pelimpah**

- Jenis : 1 pintu air pelimpah + 2 pelimpah secara alamia
- Kapasitas : 4470 meter kubik
- Ukuran : 8. 18,68 meter

### 3. Turbin

- Tipe : Francis Vertical Shaft
- Produsen : Andritz
- Putaran : 200 rpm
- Head : 70,8 meter
- Kapasitas : 63,7 – 65 megawatt

### 4. Generator

- Tipe : Umbrella
- Produsen : GE-Kanada
- Putaran : 200 Rpm
- Kapasitas : 78 MVA
- Tegangan : 11.000 volt
- Jumlah Kutub : 30 ea

## 4. Adapun manfaat dari adanya ketiga PLTA

### 1. Aspek produksi bagi perusahaan

Mendukung usaha peningkatan produksi nikel PT.VALE dengan mengutamakan efisiensi biaya produksi

### 2. Aspek kontribusi ke kas negara

- a. Penggunaan sumber air dipermukaan dan penyaluran listrik untuk masyarakat dari operasional PLTA itu, juga dibarengi dengan pembayaran pajak dan retribusi PT.VALE seperti yang diatur pemerintah



- b. Setiap satu kartal, PT.VALE telah memenuhi kewajiban pembayaran retribusi air rata-rata 1,9-2,2 juta Dolla AS lebih ke kas pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan (data 2011).
- c. PT.VALE juga memenuhi kewajiban pemabayaran pajak penerangan jalan (PPJ) dengan jumlah rata-rata sebesar Rp 950 juta-Rp 1 miliar lebih perbulan (area Sorowako) ke kas pendapatan Kabupaten Luwu Timur

### **3. Aspek Sosial**

- a. PT.VALE mendistribusikan listrik dari PLTA tersebut sebesar 8 MW kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk kebutuhan listrik masyarakat
- b. PT.VALE juga membantu peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui proyek terpadu pengamanan 127 tower dari PLTA Larona hingga PLTA Balambano melalu badan usaha milik desa (BUMDes). Jalur transmisi ini merupakan jalur listrik pendukung produksi perusahaan, pemukiman karyawan dan permukiman masyarakat. Kerja sama ini dilakukan dilima desa dari dua Kecamatan Luwu Timur dan mempekerjakan puluhan orang yang terdiri dari pengurus BUMDes dan petugas lapangan.

#### **4. Aspek Lingkungan**

- a. Mendukung usaha pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dari aktivitas pertambangan. Dengan beroperasinya hanya satu PLTA PT.VALE mampu mengurangi setengah juta metrik ton emisi karbon setiap tahunnya (bila menggunakan bahan bakar fosil)
- b. Dari beroperasinya PLTA Karebbe, PT.VALE dapat menggantikan 13 juta barel High Sulfur Fuel Oil dan sekitar 3 miliar liter solar setahun (bila menggunakan bahan bakar fosil).

Dalam pendistribusiannya, listrik yang diberikan oleh perusahaan PT.VALE kemasyarakat Luwu Timur yakni melalui mekanisme pengaturan dari setiap stasiun seperti stasiun Karebe, Balambano dan Larona. Dari setiap stasiun tersebut, masing-masing memiliki Gardu induk yang berfungsi sebagai alat pengontrol arus listrik dan sekaligus berfungsi mengatur besarnya penyaluran listrik ke gardu induk pada salah satu stasiun ke stasiun yang lain.

Dari garduk induk tersebut kemudian dilakukan proses pendistribusian listrik menuju gardu induk milik PLN Ranting Malili, kemudian PLN yang melakukan pendistribusian listrik kerumah-rumah masyarakat melalui gardu induk yang dimilikinya.

## H. **Kerangka Konseptual**

Pada dasarnya, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, pihak perusahaan dalam hal ini adalah PT.VALE telah memberikan kepada masyarakat manfaat dari pembangunan PLTA Karebbe dalam bentuk ibah daya listrik sebanyak 3 MW dan pembangunan satu buah stadion.

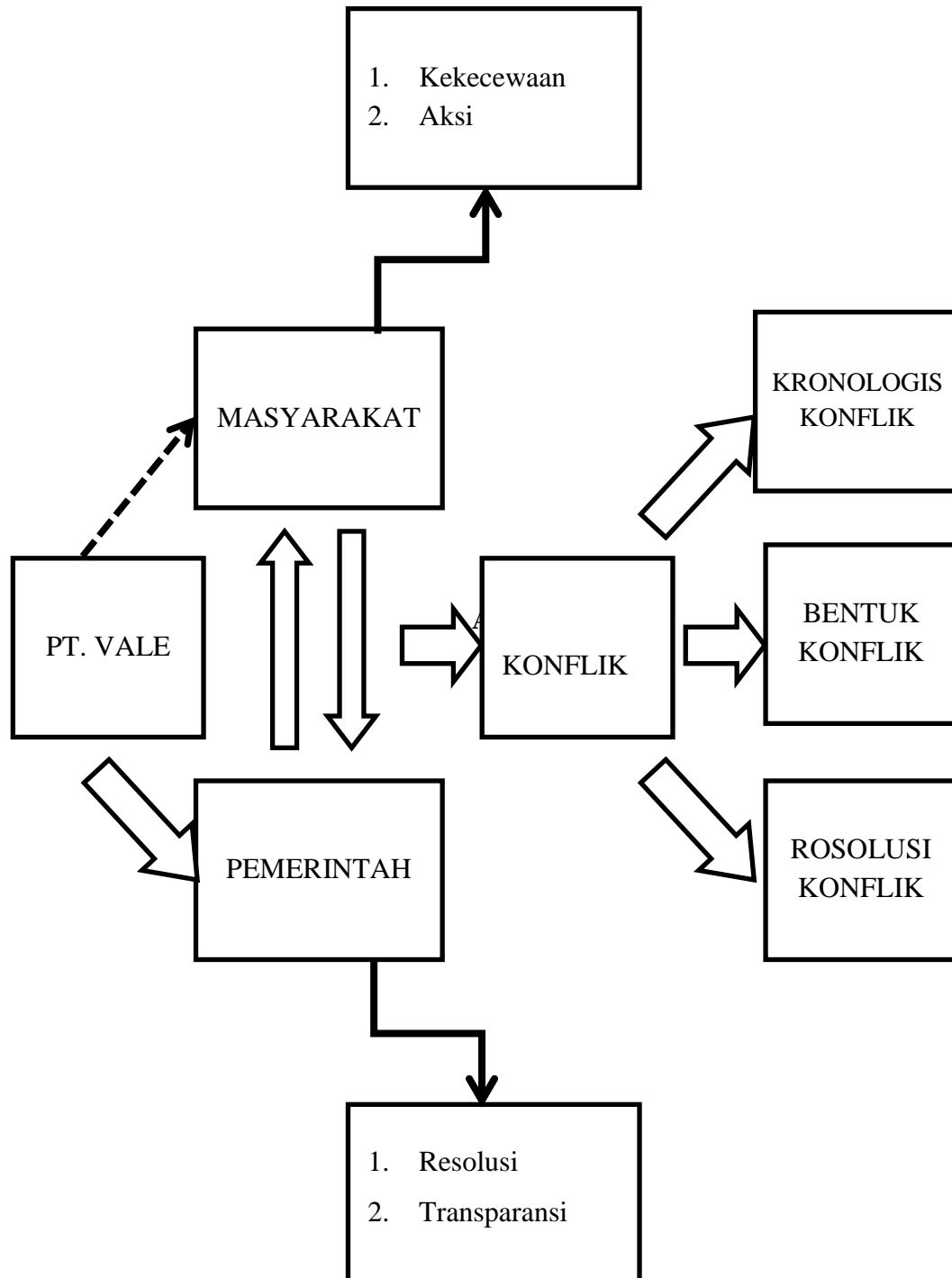
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen MOU tanggal 31 Agustus 2006. Namun sekarang telah meningkat menjadi 8 MW oleh karena pihak perusahaan menyatukan dengan pemberian daya listrik sebesar 5 MW sebelumnya pada izin pembangunan PLTA Larona pada tahun 1997, akan tetapi ketidakadanya transparansi kebijakan dalam pengelolaan pemberian ibah daya listrik tersebut, mengakibatkan kesalahpahaman yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat yang memunculkan konflik pertentangan di kedua belah pihak tersebut.

Dampak dari kesalahpahaman tersebut, memicu pertentangan oleh masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk konflik dengan pemerintah daerah, dari masalah tersebut. Pada akhirnya masyarakat mempermesalahkan alokasi anggaran pengelolaan penjualan pemberian ibah daya listrik tersebut.

Isu sosial yang mengakibatkan masyarakat menuntut transparansi dari alokasi pemberian ibah tersebut, dikarenakan bahwa ada penjual ke pihak PLN dari pemerintah atas ibah daya listrik tersebut yang sejatinya merupakan hasil distribusi listrik perusahaan ke masyarakat dalam bentuk ibah, kebijakan pengelolaan penjualan ibah tersebut tidak transparan di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menggambarkan bagaimana kronologis konflik yang melibatkan pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Lasakap tersebut, menggambarkan bagaimana bentuk konflik yang melibatkan pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap, serta menggambarkan resolusi konflik atas konflik yang melibatkan pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap. Sebagaimana alur skema kerangka konseptual sebagai berikut;

**Skema Kerangka Konseptual:**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran metode penulis yang di gunakan dalam penelitian ini, penulis membaginya menjadi 7 bagian, pertama adalah pendekatan dan strategi penelitian serta alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan dan strategi tersebut. Kedua, mengenai waktu, lokasi dan fokus penelitian, menjelaskan waktu penelitian, mengapa penelitian ini dilakukan di lokasi dan fokus penelitian tersebut. Ketiga, tipe dan dasar penelitian, menjelaskan tipe dan dasar penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Keempat adalah informan, menjelaskan teknik penentuan informan dan bagaimana karakteristik penentuan informan. Kelima adalah teknik pengumpulan data, menjelaskan bagaimana bentuk data yang dikumpulkan dalam penelitian ini teknik pengumpulannya. Dan keenam adalah teknik analisis data, menjelaskan teknik penarikan kesimpulan. berikut penjajarannya.

#### **A. Pendekatan dan Strategi Penelitian**

##### **1. Pendekatan**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. (Sugiyono, 2014:1).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena berkaitan dengan topik dan masalah yang dibahas yaitu mengenai konflik sosial antarpemerintah daerah dengan masyarakat. Pendekatan kualitatif ini digunakan agar mampu memahami, menggambarkan dan menjelaskan berbagai latar belakang masalah penelitian ini secara mendalam dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Strategi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi penelitian yaitu studi kasus, karena penelitian ini bertujuan menemukan, menggambarkan latar belakang terjadinya konflik sosial di lokasi penelitian dan menganalisis serta menggambarkan resolusi dari konflik

### **B. Waktu, Lokasi dan Fokus Penelitian**

#### **1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan selama hampir Tiga bulan, mulai 14 Mei- 4 Juni 2015. Pada waktu tersebut peneliti melakukan wawancara pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, pada dasarnya peneliti akan melakukan proses penelitian yang pertama di kantor External PT.VALE akan tetapi dikarenakan proses perizinan untuk melakukan penelitian yang prosesnya begitu lama dari bulan Mei dan baru bisa melakukan penelitian pada bulan Juni, maka dari itu peneliti memulai penelitian pertama di kantor PLN, kemudian mewawancarai Koordinator lapangan para unjuk rasa, lalu kemudian di kantor ESDM kabupaten Luwu Timur, dan terakhir di kantor External PT.VALE pada tanggal 1 Juni 2015.

## **2. Lokasi dan Fokus Penelitian**

Berlatarbelakang dari konflik tersebut, lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan yang menjadi fokus penelitian adalah seorang koordinator aksi unjuk rasa di desa Laskap, di Kantor PLN Ranting Malili, Kantor ESDM Kabupaten Luwu Timur dan Kantor External PT.VALE. Peneliti mengambil fokus penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa keempat fokus penelitian tersebut merupakan element yang mengetahui jelas tentang konflik yang terjadi.

### **C. Tipe dan Dasar Penelitian**

#### **1. Tipe Penelitian**

Tipe yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus Deskriptif, dimana sesuai dengan tujuan penelitian, dengan arahan teknik ini peneliti dapat menggambarkan konflik yang terjadi dalam antara pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap, mulai dari latarbelakang konflik, bentuk-bentuk konflik dan sampai kepada menggambarkan resolusi dari konflik yang diteliti.

#### **2. Dasar Penelitian**

Dasar penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. studi kasus, karena dalam penelitian ini peneliti mencari akar dari penyebab masalah penelitian, menggambarkan latar belakang konflik, bentuk konflik dan menggambarkan pula resolusi dari konflik.



Esensi studi kasus, kecenderungan utama dari semua jenis studi kasus adalah mencoba menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi tersebut di pilih, bagaimana implementasinya, dan apa hasilnya. (Schramm,1971).

Defenisi Studi Kasus sebagai berikut:

1. Menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana:
2. Batas-batas antarfenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana:
3. Multisumber bukti di manfaatkannya.(Robert K.Yin,

#### **D. Informan**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, tetapi Spradley menamakannya “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu empat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis, sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan di namakan responden tetapi informan.(Sugiyono,2014:50).

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik Snow Ball, dimana tehnik ini merupakan tehnik penentuan informan berdasarkan informasi atau petunjuk informan sebelumnya, dan jika informasi yang disampaikan oleh informan tersebut masih belum lengkap maka diharapkan informan selanjutnya mampu menyampaikan informasi yang lebih lengkap lagi, dan begitu seterusnya. Dalam penelitian ini, peneltian menemukan informant sebanyak 8 orang yang masing-masing mengetahui dan dapat menjelaskan tentang objek penelitian.

Adapun Karakteristik penentuan informant dalam penelitian ini;

1. Mengetahui adanya konflik
2. Terlibat langsung dalam konflik
3. Memiliki jabatan yang menangani masalah konflik tersebut.

## **E Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dari berbagai sumber data seperti data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung dari informant mengenai objek penelitian pada lokasi penelitian, berikut teknik pengumpulan data primer yang digunakan pada saat penelitian ini:

#### **1. Observasi**

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (bendaruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Adapun model observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke fokus penelitian dan sekaligus melakukan wawancara.

## **2. Wawancara Mendalam**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. (Sugiyono, 2014:72).

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur yakni jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, biasa juga disebut wawancara bebas dan terbuka.

## **3. Dokumentasi/Dokumen**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Adapun dokumentasi diambil dari penelitian ini adalah foto wawancara dengan informan dan rekaman hasil wawancara. Berikut data primer yang ditemukan selama masa penelitian;

1. Pernyataan informan yang ditentukan sesuai dengan karakteristik informan, diantara mereka terdiri dari, salah seorang masyarakat desa Laskap, kordinator lapangan aksi protes masyarakat, kepala bagian listrik kantor ESDM Kabupaten Luwu Timur, dua orang pegawai PLN Ranting Malili, dan 3 orang karyawan Eksternal PT. VALE.

2. Beberapa hasil foto dokumentasi pada saat observasi lapangan.(Terlampir).
3. Dokumen pembacaan KWH.GH Balambano.(Terlampir)

## **2. Data Sekunder**

Data yang berbentuk data-data yang sudah tersedia yang dapat di peroleh dengan cara meneliti,membaca dan mendengarkan. Data sekunder biasanya merupakan data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.(data sekunder terlampir).

Beberapa data sekunder yang ditemukan pada masa penelitian,dengan melakukan telaah pustaka mengumpulkan data dari peneltian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian,dan juga menggunakan buku, dan skripsi serta majalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Berikut data sekunder yang diperoleh pada masa penelitian;

1. Buku panduan Tentang Perusahaan PT.VALE
2. Majalah bendungan PLTA PT.VALE
3. Undang-undang unjuk rasa
4. Undang-undang tentang ketenagalistrikan
5. Referensi dari buku-buku dan laporan peneltian sebelumnya,  
yang akan ditulis dalam daftar pustaka. (Terlampir)

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitan ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis akan menggambarkan masalah yang terjadi dengan menggunakan argumen yang jelas yang diperoleh dari

mewawancarai informan dengan metode wawancara mendalam. Selanjutnya data dan informasi tersebut dianalisis secara kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah terlebih dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian menyimpulkannya secara induktif. Beberapa alur dalam menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. **Reduksi Data**, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. **Penyajian Data**, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.
3. **Kesimpulan atau Verifikasi**, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa**

Desa Laskap merupakan salah satu desa dari 13 ( tiga belas ) desa yang ada di kecamatan Malili, kabupaten luwu timur. Desa Laskap terdiri dari 2 ( dua ) dua dusun yaitu dusun Karebbe dan Dusun Labose.

- Tahun 1967 : Sesuai dengan aturan pemerintah pusat mengenai adanya keseragaman administrasi pemerintahan, olehnya itu sesuai nama yang di berikan orang- orang tua dahulu adalah kampung Karebbe, akhirnya di ubah menjadi desa Laskap, yang terdiri dari beberapa dusun diantaranya dusun Karebbe dan dusun Labose, dusun Pongkeru, dusun Kawasule, dan kepala desa pada waktu itu adalah Pak Jamali.
- Tahun 1982-1984 : Setelah di mutasikan bapak kepala desa setempat (jamali ) menjadi kepala desa Malili digantikan oleh kepala desa Laskap, terpilih pada waktu adalah S. Chabir.
- Tahun 1984-1988 : Setelah habis jabatan kepala desa pada waktu itu S. Chabir diganti oleh bapak kepala desa Laskap yang terpilih adalah Abdul Hakim untuk masa jabtan lima tahun.
- Tahun 1988-1990 : Setelah habis masa jabtan kepala desa Laskap ( Abdul Hakim ) Bapak Camat Malili, pada waktu itu menunjuk Nasir Songge sebagai PJS kepala desa Laskap disamping melaksanakan pemilihan kepala desa difintip periode lima tahun.

- Tahun 1990- 1994 : Dan setelah dilaksanakan pemilihan kepala desa Laskap pada waktu itu terpilih M. Amin sebagai Kades Laskap untuk periode 5 ( lima ) tahun tetapi pada waktu bapak M. Amin tidak bisa menjalankan tugas sampai periodenya.
- Tahun 1994-1995 : Sehubungan pada waktu itu bapak kepala desa Laskap ( M. Amin ) tidak bisa menjalankan tugasnya sampai periodenya maka M . Najib sebagai bapak camat malili pada waktu itu menunjuk H. MachfudDg. ,attone sebagai PJS desa laskap untuk menghabiskan periode M. Amin dan melanjutkan pemilihan kepala desa Laskap difinitip.
- Tahun 1995-2003 : Setelah habis masa jabtan M. Amin sebagai kepala desa Laskap ( Machfud Dg. Mattone ) sebagai PJS maka digantikan oleh Muhammad Siddiq.BM, S, H. Sebagai kepala desa Laskap selama periode lima tahun.
- Tahun 2003-2005 : Setelah habis masa jabtan bapak Muhammad Siddiq.BM, S,H. Sebagai kepala desa Laskap bapak camat malili menunjuk Andi Makkaraka sebagai PLT kades Laskap sampai ada kepala desa defenitip.
- Tahun 2005-2011: Setelah habis masa jabatannya Muhammad.Siddiq.BM.S,H. Sebagai kepala desa Laskap dilaksanakanlah pemilihan kepala desa Laskap dan terpilih bapak Muhammad Arfa.BM. sebagai kepala desa Laskap periode 6 tahun dan mulai memperbaiki sarana dan prasarana perkantoran seperti menyediakan mesin ketik, komputer, dan alat tulis kantor lainnya untuk memudahkan pelayanan masyarakat

.memperbaiki imprastruktur pembangunan rumah ibadah, taman kanak-kanak, pemangunan TPA, pembangunan Dreinase, perbaikan jalan dalam wilayah desa Laskap, meyediakan air bersih serta kebutuhan lain masyarakat desa Laskap.( RPJMDS Desa Laskap,2011-2015)

## **B. Keadaan demografis dan adaministrasi Desa Laskap**

### **a. Kedaan geografis desa**

Secara geografis Desa Laskap termasuk dalam 13 ( tiga belas ) desa dalam pemerintahan Kecamatan Malili yang berbatasan langsung dengan batas –batas wilayah.

Tabel 1.1

Letak Geografis Desa Laskap

No	Batas Wilayah	Perbatasa Wilayah
1	Sebelah Timur	Desa Pongkeru
2	Sebelah Utara	Kecamatan Nuha
3	Sebelah Barat	Kecamatan Malili
4	Sebelah selatan	Sulawesi Tenggara

Sumber: RPJMDS Desa Laskap 2011-2015

### **b. Luas wilayah**

Berdasarkan batas wilayah luas desa Laskap sekitar 585 km sebagai salah satu desa dari 13 desa yang ada dikecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagian besar lahan didesa Laskap di gunakan sebagi tempat tinggal, lokasi



kantor pemerintahan desa lahan hutan dan sebagai lahan pertanian, ada juga sebagian kecil penduduk berkebun dan beternak, namun luas penggunaan lahan tak begitu signifikan, hanya disekitar rumah saja.

#### **c. Keadaan topografi**

Keadaan topografi secara umum keadaan topografi desa Laskap adalah daerah dataran rendah dan daerah perbukitan. Wilayah dusun Karebbe dan dusun Labose berada didaerah dataran rendah (pinggiran sungai Larona dan sungai Pongkeru) dan sebagian dusun Karebbe dan dusun Labose adalah daerah perbukitan.

#### **d. Iklim**

Iklim desa Laskap sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

#### **e. Wilayah administratif pemerintahan Desa**

Desa Laskap terdiri dari 2 dusun yakni dusun Karebbe dan dusun Labose, dan jumlah rukun tetangga ( RT ) sebanyak 6. Berikut daftar nama dusun dan jumlah RT- nya

Tabel 2.1

## Wilayah Administratif Desa Laskap

No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Karebbe	3
2	Labose	3

*Sumber; RPJMDS desa laskap 2011-2015*

**f. Sarana dan Prasarana**

Berikut gambaran sarana dan prasarana yang ada didesa laskap;

Tabel 3.1

## Sarana dan Prasaran Desa Laskap

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	kantor desa	1
2	Pustu	1
3	Masjid	2
4	Lapangan Bola	2
5	Lapangan Volly	2
6	TPA	1
7	SDA	2
8	Posyandu	2

*Sumber ; RPJMDS Desa Laskap 2011-2015*

### **C. Keadaan Demografi Desa Laskap**

#### **a. Jumlah penduduk**

Penduduk desa Laskap terdiri dari 425 KK dengan total jumlah jiwa 1796 Orang, berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin desa Laskap

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1004
2	Perempuan	791
	Total	1795

*Sumber ; RPJMAD Desa Laskap 2011-2015*

#### **b. Tingkat perbandingan pendidikan**

Berikut perbandingan jumlah pendidikan di desa Laskap ;

Tabel 5.1

Tingkat perbandingan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	5

Sumber ; RPJMDA Desa Laskap 2011-2015

### c. Tingkat kesejahteraan penduduk

Tabel 6.1

Tingkatan kesejahteraan Penduduk desa Laskap

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	sejahtera	413
2	Prasejahter	12
	Total	425

Sumber; RPJMDS Desa laskap 2011-2015

### d. jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian

Desa Laskap adala satu desa yang terletak berada di sekitar 9 KM dari ibukota kabupaten Luwu Timur. Sebagian besar penduduk didesa Laskap bekerja sebagai petani, desa Laskap juga merupakan desa jasa dan perdagangan sehingga sector ini juga menjadi pengahsilan hidup bagi sebagian masyarakat.

Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk

Tabel 7.1

persentase tingkatan mata pencaharian masyarakat desa Laskap

No	Mata Pencaharian	Persentase	KK
1	Petani	50%	$50/100\% \times 425 = 212$
2	Wiraswasta	20%	$20/100\% \times 425 = 85$
3	Karyawan	10%	$10/100\% \times 425 = 42$
4	Pengrajin	10%	$10/100\% \times 425 = 42$
5	Peternak	0,50%	$0,5/100 \times 425 = 22$
6	PNS	0,50%	$0,5/100 \times 425 = 22$
	Jumlah	100%	425

*Sumber ; RPJMDS Desa Laskap 2011-2015*

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Segala hal yang di tuangkan dalam pembahsan pada Bab V ini, merupakan data yang telah terhimpun selama peneliti melaksanakan penelitian yakni mulai tanggal 14 Mei-4 Juni di lokasi dan fokus penelitian, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. yang dimaksud data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung dilapangan sebagai media yang di gunakan untuk pengumpulan data.

Dari data yang ditemukan, diperoleh beberapa jawaban mengenai beberapa hal dan sekaligus menjawab beberapa rumusan masalah pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menggambarkan latarbelakang terjadinya konflik, menggambarkan bentuk-bentuk konflik yang melibatkan pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap, serta menggambarkan resolusi dari konflik tersebut.

Adapun susunan isi dari hasil penelitian tentang konflik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap, (studi kasus pengelolaan sarana listrik PT.VALE, PLTA Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur), adalah sebagai berikut:

A. Identitas Informan

B. Bagaimana kronologis konflik (Perlawanan) yang terjadi antarar Pemerintah daerah dengan Mayarakat Desa Laskap?

C. Bagaimana bentuk-bentuk konflik (Perlawanan) yang terjadi antar Pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap?

D. Bagaimana bentuk resolusi terhadap konflik (Perlawanan) yang terjadi antar Pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap?

#### **A. Identitas Informan**

Informan dalam penelitian ini diklasifikasikan dengan berbagai hal sebagai berikut;

##### **1. Umur**

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan peran, memperoleh informasi atau berbagai pengalaman dan pengambilan keputusan dalam lingkungannya. Umur akan memberikan pengaruh yang besar pada seseorang tentang bagaimana ia bertindak dan melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

##### **2. Jenis Kelamin**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap informan yang diwawancarai maka penulis dapat mengetahui jenis kelamin dari masing-masing informan.

##### **3. Pekerjaan /jabatan**

Pekerjaan sangat menentukan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pekerjaan akan memberikan pengaruh terhadap peranan seseorang dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting bagi seseorang dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pendidikan akan memberikan pengaruh pada pola pikir seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Setiap peningkatan Sumber Daya Manusia, tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhinya.

#### 5. Tempat Tinggal/ Tempat Domisili

Penulis sengaja mencantumkan tempat tinggal atau tempat domisili informan karena penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian dan 4 fokus penelitian. Berdasarkan teknik penentuan informan yang dilakukan oleh penulis yaitu snow ball sampling dimana teknik ini merupakan teknik penentuan informan berdasarkan informasi atau petunjuk informan sebelumnya, dan jika informasi yang disampaikan oleh informan tersebut masih belum lengkap maka diharapkan informan selanjutnya mampu menyampaikan informasi yang lebih lengkap lagi, dan begitu seterusnya.



**Tabel 8.****Informan**

<b>No</b>	<b>Nama informan</b>	<b>umur</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>jabatan</b>	<b>pendidikan</b>	<b>Domisili</b>
1	Informan A	23	laki-laki	Pegawai swasta/Masyarakat	S1	Desa laskap
2	Informan H	25	laki-laki	Mahasiswa	Mahasiswa	Desa laskap
3	Informan N	40	laki-laki	Staf Administrasi PLN	S1	Desa malili
4	Informan B	38	laki-laki	Staf distribusi PLN	S1	Desa malili
5	Informan M	38	laki-laki	Kepala bagian listrik ESDM 2011	S1	Desa malili
6	Informan M	33	laki-laki	Govrel & regional officer	S1	Desa malili
7	Informan A	36	laki-laki	Health sector officer	S1	Desa sorowako
8	Informan D	41	laki-laki	Kordinator proyek DAM Karebbe	S1	Desa malili

*Sumber pengolahan data pimer 2015*

## **B. Kronologis Terjadinya Konflik (Perlawanan) Antar Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Desa Laskap**

Sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri pertambangan yang memproduksi nickel sebagai bahan produksi dan pendapatan perusahaan. Perusahaan ini bernama PT.IN CO “PT.international nickel Indonesia.Tbk’yang sekarang berganti nama dengan PT.VALE.

PT.VALE adalah salah satu produsen nikel utama dunia. nikel adalah logam serba guna yang berperan penting meningkatkan taraf hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi. selama hampir 40 tahun, sejak penandatanganan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1968.

PT.VALE telah memberikan lapangan kerja dan pelatihan, telah menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di lingkungan tempat beroperasi yang dimaksud adalah 4 wilayah pemeberdayaan dikabupaten Luwu Timur seperti,Kecamatan Nuha, Kecamatan Wowundula, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Malili.

PT.VALE didirikan pada bulan juli 1968 sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Vale Inco limited dan menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 1 April 1978-31 Maret 2008 yang saat itu bernama PT.International Nickel Indonesia. setelah penandatanganan kontrak karya tersebut PT.VALE mulai mengeksplorasi daerah kontrak karya seluas 6,6 juta hektar yang mula-mula diberikan bagi PT.VALE dibagian Timur dan Tenggara Sulawesi,sebagaimana diatur dalam kontrak karya tersebut, luas daerah tersebut secara bertahap dikurangi sebanyak 2,9 % akibat serangkaian pelepasan

areal konsesi dan setelah menemukan lokasi yang lebih tepat untuk operasi PT.VALE. dan setelah dilakukannya renegotiasi pada bulan Januari 1996 dan berlakunya Oktober 2014 sampai 28 Desember 2025 luas daerah eksplorasi kontrak karya PT.VALE menjadi adalah 118,435 hektar.

Pada tahun 1970 sampel pertama dari bijih nikel yang ditemukan sebanyak 50 ton dan berdasarkan hasil penelitian perusahaan di Port Colborne, Ontario, Kanada, bahwa bahan yang ditemukan disorowako dapat diolah menjadi nikel. Oleh karena itu PT.VALE memulai konstruksi pabrik pertama pada tahun 1973 dengan satu lini pengolahan pyrometalurgi dan fasilitas-fasilitas terkait., dikarenakan sumber energi bahan bakar fosil yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pabrik maka pada tahun 1974, PT.VALE membuat keputusan untuk mengganti bahan bakar fosil dengan listrik tenaga air sehingga pada tahun 1975 PT.VALE memulai konstruksi dua lini pengolahan lagi dan satu instalasi pembangkit listrik tenaga air. PT.VALE yang mulai memproduksi secara komersial pada bulan April 1979.

Pada tahun 1993, PT.VALE berhasil menyelesaikan perluasan fasilitas sehingga kapasitas produksi nominal pertahun yang mula-mula sebesar 36.287 metrik ton (80 juta pon) nikel dalam matte menjadi 45.359 ton (100 juta pon). Pada tanggal 15 Januari 1996, PT.VALE menandatangani perjanjian perubahan dan perpanjangan kontrak karya tahun 1968 dengan pemerintah untuk melakukan perubahan dan perpanjangan terhadap kontrak karya tahun 1968 tersebut hingga tahun 2025.

Sesuai dengan perjanjian perpanjangan tersebut, PT.VALE berhasil menuntaskan ekspansi berskala besar yang meningkatkan kapasitas rancang tahunan fasilitas pengolahan menjadi 68.039 metrik ton (150 juta pon) nikel dalam matte dan menambah fasilitas baru pembangkit tenaga air di balambano, yang selesai pada tahun 1999 dengan produksi daya listrik rata-rata 110 megawatt

Pada tahun 2003 untuk pertama kalinya PT.VALE berhasil melampaui kapasitas rancangannya, dengan produksi sebesar 70.216 metrik ton (154.8 juta pon). sejak itu, PT.VALE secara konsisten memproduksi nikel dalam Matte di atas kapasitas rancang tersebut dengan dilakukannya pengembangan areal tambang sampai pada tahun 2014 tercatat produksi nikel perusahaan sebanyak 78,726 ton nikel dalam matte.

PT.VALE memproduksi nikel dalam Matte dari biji laterit di fasilitas pengolahan yang terintegrasi dengan fasilitas penambangan yang PT.VALE miliki di sorowako pulau sulawesi. Nikel dalam Matte adalah produk setengah jadi dengan kandungan rata-rata nikel sebesar 78 %, sulfur sebesar 20 % dan kobalt 2 %.

Seluruh produksi PT.VALE dijual dalam bentuk Dolar Amerika Serikat berdasarkan kontrak jangka panjang. kekuatan daya saing PT.VALE terletak pada cadangan bijih yang melimpah, tenaga kerja terampil yang terlatih dengan baik, listrik tenaga air yang berbiaya rendah, dan adanya kepastian untuk produk yang dihasilkannya.

PT.VALE memiliki Visi untuk menjadi salah satu pemimpin produsen nickel utama dunia, sedangkan Misi yaitu mengembangkan sumber daya Indonesia yang dipercayakan kepada PT.VALE, PT.VALE memenuhi komitmennya kepada penanam modal melalui pertumbuhan pendapatan jangka panjang yang konsisten, kepada karyawan dengan memastikan terwujudnya pekerjaan yang memenuhi unsur-unsur keselamatan, kesehatan, dan kepuasan kerja.

Kepada pelanggannya,PT.VALE mengirimkan produk yang berkualitas dengan tepat waktu. kepada republik Indonesia dengan menjadi warga perusahaan yang bertanggung jawab, memenuhi komitmen kontrak karya serta memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Dengan kata lain dengan adanya beberapa Visi dan Misi perusahaan tersebut, perusahaan ikut berkewajiban langsung membangun bersama pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai aturan UU 40 tahun 2007 tentang CSR/Corporate Social Responsibility.

berbagai hal yang dilakukan oleh perusahaan seperti bagi masyarakat,menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan dalam bentuk pendidikan dan termasuk memberikan pendapatan daerah dalam bentuk pajak perusahaan, sedangkan bagi pelestarian lingkungan hidup masyarakat, PT.VALE telah melakukan berbagai hal dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti, program eksplorasi areal penambangan yang ramah lingkungan, reboisasi lingkungan pasca penambangan, dan meminimalisir penyebaran polusi udara akibat operasi mesin pabrik, salah satu cara perusahaan menangani hal tersebut

yakni pada tahun 2005 dilaksanakannya pembangunan Bag House System pada tanur PLTA 3 untuk mengurangi emisi debu atau polusi udara dari operasi pabrik sekaligus menambah distribusi listrik untuk mesin pabrik perusahaan serta mendistribusikan listrik ke pada PLN dan pemerintah daerah untuk kebutuhan listrik masyarakat yaitu sebesar 3 MW, yang saat ini dinamakan PLTA Karebbe dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 2011.

Informant “A” menjelaskan bahwa.

*“Kami dari pihak perusahaan sangat bersyukur dengan membuka perusahaan di daerah ini, karena adanya 3 danau, yakni danau Mahalona, danau Matano dan Danau Towoti yang memiliki sumber air yang begitu banyak, yang merupakan alasan kenapa kami membangun tiga pula Bendungan PLTA perusahaan yang ada di daerah ini”* (wawancara dengan informant “A” di kantor External PT.VALE, tanggal 1 juni 2015).

Berdasarkan pernyataan tersebut, adanya tiga danau yang memiliki sumber air yang begitu besar terletak di areal penambangan merupakan salah satu faktor pendukung perusahaan untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik dengan tenaga air yang diawali dengan pembangunan bendungan, termasuk pembangunan PLTA Karebbe.

Ketiga danau tersebut adalah:

### **1. Danau Matano**

Danau Matano ini berada paling Barat di Luwu Timur, memiliki luas 160 KM2 dengan kedalaman 583 Meter dan Temperatur 28,7 derajat Celsius. Danau Matano juga Merupakan danau terdalam di Indonesia dan 10 besar terdalam didunia. Danau tektonik ini, terhubung dengan sungai Petea yang alirannya menuju Danau Mahalona. Dan kemudian terhubung dengan Danau Lantoa dan Danau Masapi termasuk dalam sistem Danau Malili.

### **2. Danau Mahalona**

Danau ini memiliki luas 25 KM2 dengan kedalaman 310 meter, Danau Mahalona lebih dari pada Danau Matano dan Danao Towuti.

### **3. Danau Towuti**

Danau Towuti memiliki luas 585 KM2 dengan kedalaman 293 Meter dengan temperatur rata-rata 29,2 derajat

Oleh karena ketiga danau ini, kebutuhan air untuk debit pembangkit listrik ketiga PLTA perusahaan yang saling terhubung antar ketiga danau tersebut sangat baik guna menghasilkan listrik, kemudian didistribusikan ke pabarik untuk kebutuhan daya listrik mesin pabrik.

Namun setelah setahun beroperasinya salah satu PLTA perusahaan yakni PLTA Karebbe, menuai konflik antar pemerintah daerah dengan masyarakat desa Laskap, pada bulan Desember 2012 yang dipicu oleh pemberian daya listrik oleh perusahaan atas PLTA Karebbe sebanyak 3 MW dan terkait pula pemberian daya listrik sebesar 5 MW dari PLTA Larona, yang kemudian disatukan menjadi 8 MW oleh kebijakan perusahaan PT.VALE.

Berdasarkan pernyataan informan “M” bahwa,

*“pada saat perusahaan mau melakukan pembangunan, ada aturan pemerintah pusat yang pada saat itu menteri PU dan Sumber Daya Alam, memerintahkan bahwa perusahaan boleh membangun PLTA dengan Bendungannya asalkan perusahaan bersedia memberikan 5 MW kepada masyarakat tahun 1979, pada awalnya pemberian dialokasikan kepada masyarakat Luwu Raya, dikarenakan kabupaten Luwu Timur pada saat itu belum terbentuk, dan 3 MW berasal dari pemberian daya listrik atas pembangunan PLTA Karebbe melalui pemerintah daerah untuk Masyarakat tahun 2006, yang sekarang menjadi 8 MW.”* (wawancara dengan informan “M” di rumah informan, JL. Bangker, pada tanggal 2 Juni 2015).



Berdasarkan pernyataan diatas, pemberian daya listrik oleh perusahaan yang sejatinya sebanyak 8 MW, 3 MW adalah ibah pemeberian daya listrik terhadap pembangunan PLTA Karebbe melalui pemerintah daerah untuk Masyarakat sedangkan 5MW adalah merupakan daya listrik yang berasal dari kesepakatan pemerintah pusat dengan perusahaan atas pembangunan PLTA Larona pemberian daya listrik tersebut dilimpahkan dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah Luwu Raya.

Alasan pelimpahan tersebut dikarenakan pembentukan Kabupaten Luwu Timur tidak bertepatan dengan pemberian daya listrik tersebut, Luwu Timur baru terbentuk pada tahun 2002 oleh pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah luwu raya setelah pembentukan dan pemekaran kabupaten Luwu Utara.

Informant “ D “ menerangkan bahwa,

*“PLTA karebbe dibangun karena perusahaan ingin menambah hasil produksi sedangkan listrik dari PLTA sebelumnya tidak cukup listriknya yang masuk keperusahaan maka itu dimulailah pembangunan PLTA Karebbe pada tahun 2003, dan sempat tertunda pada tahun 2006 sampai 2008 lalu kemudian kembali dimulai pada tahun 2008 sampai 20013 ,mulai dari pra kontruksi ,kontruksi banyak masalah sosial yang timbul akibat pembangunan PLTA ini.”(wawancara dengan informant “D” di kantor External PT.VALE,tanggal 1 juni 2015).*

Berdasarkan penjelasan informant, bahwa PLTA Kerebbe sejatinya merupakan salah satu sumber distribusi listrik perusahaan yang sekaligus menambah kekuatan listrik pembangkit listrik perusahaan sebelumnya, yakni PLTA Larona dan PLTA Balambano. Pembangunan PLTA Kerebbe banyak memicu masalah sosial yang timbul dikalangan masyarakat dengan perusahaan mulai dari prakonstruksi pembangunan bendungan, konstruksi sampai kepada pasca konstruksi, salah satu masalah penundaan pembangunan, masalah perekrutan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal sampai kepada konflik vertikal antarpemerintah daerah dengan masyarakat desa laskap yang mempermasalahkan alokasi hasil penjualan pemberian biaya daya listrik atas pembangunan PLTA Kerebbe.

Secara sosiologis, konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik senantiasa ada dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh karena itu, konflik dan integrasi merupakan hal yang senantiasa mengisi kehidupan manusia.

**Menurut Marx tentang kehidupan sosial yaitu:**

1. Masyarakat sebagai arena yang didalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan.
2. Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berpihak pada kekuatan yang dominan.
3. Paksaan dalam bentuk hukum dipandang sebagai faktor pribadi, perbudakan, kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan

kesempatan. Kesenjangan sosial terjadi dalam masyarakat karena bekerjanya lembaga paksaan tersebut yang bertumpu pada cara-cara kekerasan, penipuan, dan penindasan. Dengan demikian, titik temu dari konflik sosial adalah kesenjangan sosial.

4. Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas penguasa demi keuntungan mereka.
5. Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain, sehingga konflik tak terelakkan lagi.

Pada sistem kehidupan sosial, konflik yang terjadi biasanya berakar pada adanya perbedaan dan persamaan kepentingan sosial,manusiapun pada dasarnya tidak ada yang memiliki kesamaan yang persis,baik dari unsur etnis,kepentingan,kemauan,kehendak, tujuan dan sebagainya. Menurut William Chang, konflik biasanya juga didorong ataupun dilatarbelakangi oleh emosi manusia sesaat sampai dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Yang perlu diperhatikan juga adalah perbedaan ideologi antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial lainnya.perbedaan ideologi pada dasarnya menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya konflik sosial dikehidupan sosial.Secara garis besar, para sosiologi berpendapat bahwa akar utama dari penyebab konflik sosial adalah disfungsi sosial, artinya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada didalam struruktur dan sistem masyararakt tidak berjalan sebagai mana fungsinya,nilai dan norma sosial tidak lagi ditaati,pranata sosial dan sistem pengendaliaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

**Menurut Turner, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik sosial diantaranya:**

1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya yang sangat terbatas didalam masyarakat.
2. Ditariknya kembali legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah
3. Adanya pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan
4. Sedikitnya saluran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat kelas bawah serta lambatnya mobilitas sosial keatas
5. Melemahnya kekuasaan negara yang disertai dengan mobilisasi masyarakat kelas elite
6. Kelompok masyarakat kelas bawah menerima ideologi radikal.

Pada konteks kekinian, masyarakat sangat rentan dengan konflik yang dialatarbelakangi oleh isu-isu radikal sebagai akibat dari ketimpangan sosial, hilangnya legitimasi masyarakat kepada para pemangku kekuasaan, dan perbedaan pandangan terhadap masalah sosial pada kehidupan sosial. Gejala ini menyimpan konflik laten yang mudah tersulut menjadi konflik vertikal.

Konflik sosial yang timbul pada pasca pembangunan PLTA Karrebe, adalah konflik vertikal yang merupakan konflik yang terjadi diantara pemerintah daerah dan masyarakat Desa Lakap, yang sebagian besar merupakan masyarakat Desa Laskap, informan 'A' menerangkan bahwa,

*“masyarakat pada saat, mempermasalahkan apa yang diberikan PT.VALE pada masyarakat Desa Laskap atas pembangunan PLTA Karebbe, setelah masyarakat tau bahwa ada dikasi masyarakat listrik 3 MW dan 5 MW yang katanya dijual ke PLN makanya masyarakat menuntut kemana hasilnya itu penjual daya listrik yang semuanya mi 8 MW’(hasil wawancara dengan masyarakat desa laskap, pada tanggal 24 januari 2015, studi pendahuluan)*

Informant M, Membenarkan bahwa,

*“Pada tahun 2006, ada memang MOU atas pembangunan Bendungan PLTA Karebbe yang berisi **“Dengan pembangunan DAM Karebbe, PT VALE sepakat memberikan 3 MW untuk kebutuhan listrik masyarakat kabupaten luwu timur”**, MOU ini dibuat pada tanggal 31 agustus 2006, ditandatangani oleh, Andi Hatta Mrakarma (Bupati Luwu Timur), Arief Sireagar (President PT.INCO) dan Andi Hasan (Ketua DPRD)” ( wawancara dengan informant ‘M’ melalui VIA SMS, tanggal 4 juni 2015)*

Informant M, juga turut memberikan keterangan bahwa,

*“Pemda memang telah membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan, atas pemberian ibah daya listrik kemasyarakat atas pembangunan bendungan PLTA Karebbe dan merupakan pula bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat Luwu Timur, itu ada MOUnya namun ibah ini berbentuk pendapatan daerah karena pemerintah daerah hanya menerima ibah tersebut dalam bentuk dana*

*hasil penjualan daya listrik tersebut sebesar 8 MW, 5 dari pemberian atas izin pembangunan PLTA larona tahun 1997 dan 3 MW atas ibah pemberian perusahaan dalam pembangunan PLTA Karebbe Tahun 2006” ( wawancara dengan informant “ M “ di kantro ESDM Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 18 mei 2015).*

Kutipan hasil wawancara dengan seorang anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Di komisi III, pada tanggal 14 december 2012” Muh.S\iddq.BM.SH, mengatakan bahwa,

*“Pemerintah daerah memang memperoleh pendapatan daerah dari sektor listrik perusahaan PT.VALE, semuanya dari penjualan daya listrik ke pihak PLN sebanyak 5 MW dari PLTA Larona tahun 1997 hasil pendapatan daerah sebesar Rp 31/Kwh/hour, dan tambahan 3 MW dari PLTA Karebbe hasil pendapatn daerah menjadi sebesar Rp 350/Kwh/hour, dari hasil penjualan tersebut pemda memperoleh sebesar Rp350/KWH/Hours semuanya diatur oleh peraturan perjanjian atau nota kesepahaman tahun 1997”.*

Berbeda dengan Informant “N” menjelaskan bahwa,

*“Kami memang telah melakukan transaksi penjualan dengan pihak perusahaan sebanyak 8 MW yang dijual perusahaan ke PIHAK PLN ranting Malili, yang tiap bulan tercatat dalam surat pembacaan KWH” hasil pembelian itu seharga 656/KWH/hour sesuai aturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2012” (wawancara dengan informant “N” di kantor PLN Ranting Malili, pada tanggal 5 juni 2015) (surat pembacaan KWH terlampir)*

Senada dengan pernyataan informan “N” informant “ B “ juga menyatakan bahwa,

*“Kami tidak melakukan pembelian dengan pemerintah daerah karena pemerintah tidak memiliki alat pembangkit listrik, pemerintah daerah cuman memiliki daya oleh karenanya, PLN membeli daya listrik dengan perusahaan sebanyak 8 megawatt, dan meminta lagi pembelian sebanyak 2,7 megawatt”. ( wawancara dengan wakil ketua PLN Ranting Malili, pada tanggal 7 Juni 2015 ).*

Informant “M” menerangkan bahwa,

*“Perusahaan memang memberikan ijab yang dituangkan dalam MOU tahun 2006 atas pembangunan PLTA Karebbe dan pemberian daya atas izin pada pembangunan PLTA larona tahun 1997 dalam bentuk dana hasil penjualan daya listrik ke pihak PLN, lalu kemudian hasil penjual kami berikan ke PEMDA tanpa potongan sepersen pun sebagai pendapatan daerah, kami menjual ke PLN itu seharga RP.*

*656/ KWH/Hour.dan kami menjual ke PLN pada saat itu ,dikarenakan pemerintah belum mampu mengelola daya listrik tersebut”.(wawancara dengan informant “M” di rumah informant , JL.Bangker,pada tanggal 2 Juni 2015).*

Penjelasan diatas dikuatkan dengan adanya undang-undang No 30 tahun 2009, tentang ketenagalistrikan, pasal 3 tentang penguasaan, pasal 4 tentang perusahaan dan pasal 5 tentang kewenangan pengelolaan sumber-sumber tenaga listrik negara. (undang-undang terlampir)

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kronologis konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap,karena ketidakhadanya transparansi kebijakan atas pengelolaan dan pengalokasian dana penjualan ibah daya listrik sebesar 3 MW dari PLTA Karebbe dan 5 MW dari PLTA Lorana oleh perusahaan PT.VALE yang model transaksinya melalui penjualan PT.VALE Ke pihak PLN kemudian hasil penjualan menjadi anggaran pendapatan daerah dari sektor ibah listrik tersebut.



**C. Bentuk – bentuk konflik (Perlawanan) yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat desa Laskap**

Konflik merupakan bentuk proses sosial dimana masing-masing pihak yang berinteraksi saling menghancurkan yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang menimbulkan benturan-benturan antara dua orang atau lebih, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok atau biasa dikenal dengan salah satu bagian dari proses-proses disosiatif atau proses yang tidak mengalami penyatuan. disosiatif merupakan pula keadaan realitas sosial dalam keadaan disharmoni sebagai akibat adanya pertentangan antar-anggota masyarakat.

Proses sosial yang disosiatif ini dipicu oleh adanya ketidaktertiban sosial atau social disorder, keadaan ini memunculkan diintegrasi sosial akibat dari pertentangan antar-anggota masyarakat maupun masyarakat dengan para penguasa/pemerintah, dan dalam penelitian ini proses disosiatif yang lebih ditekankan adalah konflik (pertentangan atau pertikaian) selain persaingan dan controversion (Burhan Bungin, 2011, 62).

Sedangkan berdasar pada jenis konflik yang menjadi objek penelitian ini adalah jenis konflik vertikal, Konflik vertikal atau biasa juga disebut konflik keatas yang dimaksud adalah konflik elite dengan massa, elite disini merupakan para penguasa yang memegang kendali kekuasaan dan penentu kebijakan juga dapat diartikan pada konteks kekinian adalah pemerintah sedangkan yang dimaksud massa adalah rakyat. (suadi dkk., 2013: 41-43)

informant “ A” menyatakan bahwa,

*“pada bulan 12 memang ada aksi protes dilakukan oleh masyarakat, masyarakat yang paling banyak massanya dari desa Lasakap dan itu pada saat aksi di depan Kantor External, aksi protesnya itu mereka unjuk rasa lalu kemudian aksi unjuk rasa beralih ke Jalan bangker,disitulah baru bergabung masyarakat malili,lalu dikawal oleh forum masyarakat pemberdayaan kecamatan Malili unjukrasa ini tentang Bendungan PLTA Karebbe”* ( wawancara dengan masyarakat Desa Laskap, pada tanggal 5 maret 2015,hasil studi pendahuluan).

Berdasarkan pernyataan tersebut ,bentuk konflik yang terjadi adalah pertentangan antar pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap, yang berujung pada aksi protes yang memprotes atas ketidakadanya transparansi kebijakan pemerintah atas pengelolaan anggaran hasil penjualan ibah listrik.

Informant “H’ turut membenarkan bahwa ,

*“Kami melakukan aksi protes sebanyak 9 kali pada bulan 14-12 2012 – bulan 3 2013, kami melakukan aksi dimulai dari depan Kantor External PT.Vale kemudian, di jalan poros malili bangker dan terakhir di depan kantor DPRD kabupaten Luwu Timur, kami menuntut alokasi penjualan ibah listrik sebanyak 5 MWPembangunan PLTA Larona dan 3 MW dari pembangunan PLTA Karebbe”(wawancara dengan kordinator aksi unjuk rasa ,via telpon).*

Aksi protes pada dasarnya merupakan sebuah Gerakan Protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang dihadapan umum, Aksi Protes biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat suatu kelompok masyarakat atau penentangan kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kelompok kepentingan.

**Informant “ M “ menyatakan bahawa,**

*“pada saat aksi berlangsung mereka menuntut program listrik gratis atas adanya MOU tersebut atas pembangunan PLTA Larona dan Karebbe,namun kami menolak atas tuntutan tersebut dikarenakan tuntutanya sangat sulit dipenuhi selain itu juga mereka melakukan tindakan anarkis dalam aksi demonstrasinya. Tindakan anarkisnya berupa perusakan dan penebangan pohon dan penutupan jalan”*(wawancara dengan Kepala Bagian Kelistrikan Dinas ESDM tahun 2011 Kabupaten Luwu Timur,pada tanggal 18 mei 2015)

*“Anarkisme muncul juga dikarenakan cekcok antara para unjuk rasa dengan pihak DPRD,dikareanakan permintaan unjuk rasa tidak direspon yakni unjuk rasa meminta akan keterbukaan pemerintah daerah dengan pihak Perusahaan atas kesepakatan yang dituntut”*.( kutipan artikel komite pemantau legislatif news,Dec,16 2012)

Berdasarkan pernyataan tersebut, bentuk konflik yang pada awalnya berbentuk aksi protes kemudian berkembang menjadi aksi anarkisme yang berupa pengrusakan lingkungan termasuk penebangan pohon disekitar jalan dan pada akhirnya masyarakat melakukan penutupan jalan yang merupakan satu-satunya akses distribusi logistik perusahaan.

Paham Anarkisme muncul dari kata serapan dari bahasa inggris anarchy atau anarchie, yang berakar dari kata yunani anarchos/anarchien tanpa pemerintahan atau pengelolaan koordinasi tanpa hubungan memerintah dan diperintah, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan dan dikendalikan, dan lain sebagainya. Sedangkan anarkis berarti orang yang mempercayai atau menganut anarki, sedangkan isme sendiri merupakan paham/ajaran/ideologi.

Jadi anarkisme adalah paham atau pendirian yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat terbaik bagi semua jika tidak diperintah maupun adanya otoritas. Para penganut paham anarkis akan selalu terbawa oleh pemikiran bahwa semua bentuk otoritas dan symbol otoritas harus dilawan, teori sosialis menerangkan bahwa segala bentuk paham kapitalis dan kepemilikan pribadi harus dihapuskan, jadi para kaum anarkis kebanyakan melegalkan tindakan kekerasan dalam melawan otoritas.

Kesimpulan bahwa, perilaku anarkis adalah aktifitas yang dilakukan manusia dengan motif dan tujuan tertentu yang mengarah pada kekerasan dan tindakan yang melawan hukum. perilaku anarkis bisa timbul dari pengaruh dari dalam dan diluar diri manusia, faktor pengaruh dari dalam diri manusia adalah

kondisi pikiran manusia itu ketika dia melakukan tindakan sedangkan faktor dari luar diri manusia adalah lingkungan sosial manusia itu sendiri. ([http. setetesilmu blog.blogspot.com](http://setetesilmu.blogspot.com).26 DES,2015,20:49)

Informant “A” menyatakan bahwa,

*“Setelah aksi penutupan jalan tersebut, pemerintah menurunkan brimob yang disuruh untuk membubarkan pendemo,pendemopun bubar dan pada saat itu terlihat brimob melakukan pemukulan kepada saudara Malek/Hasruddin”*( hasil wawancara dengan masyarakat desa laskap, pada tanggal 24 januari 2015,studi pendahuluan)

Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk konflik yang berkembang dari aksi anarkisme kemudian berkembang menjadi aksi pembubaran paksa oleh pihak kepolisian sebagai akibat massa yang melakukan aksi penutupan jalan yang disertai aksi kekerasan pemukulan terhadap para anggota masyarakat yang melakukan protes.

#### **D. Resolusi konflik (Perlawanan) yang terjadi antara pemerintah daerah dengan para masyarakat Desa Laskap**

Konflik yang berlangsung sangat lama pada akhirnya akan merusak tatanan kehidupan masyarakat dan menghilangkan legitimasi kekuasaan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang pada dasarnya merupakan aktor yang lebih berperan dalam mencari penyelesaian konflik.

Konflik yang terjadi sejatinya akan mengakibatkan perubahan akan tetapi sebelumnya melalui proses kehancuran baik itu ikatan individu maupun kelompok dan juga akan mengalami proses penyatuan, oleh karenanya konflik sangat membutuhkan resolusi untuk mencapai ketaruran sosial.

Resolusi konflik merupakan cara yang ditempuh sebagai pilihan alternatif dalam penyelesaian konflik apabila resolusi konflik sebelumnya dari konflik yang terjadi belum mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam hal menyikapi konflik, pada dasarnya dalam hukum kekekalan konflik dijelaskan bahwa antara kehidupan sosial dan konflik merupakan gejala sosial yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri artinya konflik tidak dapat diciptakan dalam kehidupan sosial dan tidak dapat dimusnahkan yang didasarkan dari pandangan bahwa konflik merupakan gejala yang serba hadir dan melekat dalam setiap kehidupan sosial sehingga untuk menghilangkan konflik berarti menghilangkan masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya konflik tidak bisa dihilangkan akan tetapi dapat diredam melalui proses pengaturan atau konflik configuration, dan tidak menimbulkan proses kekerasan. Menurut Dahrendorf yang melihat konflik dari segi intensitas dan sarana yang digunakan dalam konflik itu sendiri, intensitas diartikan sebagai bagaimana tingkat keterlibatan kontestan yang ada didalamnya terdapat waktu, waktu, tenaga, dana dan pikiran. Adapun kekerasan artinya sarana yang digunakan untuk oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam mempertahankan kekuasaan.

Berdasar pemahaman diatas,dapat dapat disimpulkan bahwa konflik tidak dapat diselesaikan, dimana konflik akan selalu memunculkan tesis lalu kemudian berhadapan dengan antitesis kemudian memunculkan sintesis dan pada akhirnya kembali kepada proses awal yakni berhadapan dengan tesis dan antitesis yang baru dengan melalui proses pengaturan kemudian menghasilkan tesis baru.

Sejatinya bahwa konflik yang telah terjadi tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat diredam dengan melalui mekanisme pengaturan yang berbentuk konsiliasi yakni pengaturan oleh lembaga-lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab pada suatu konflik salah jalan yang dapat ditempuh untuk meredam konflik adalah melakukan jalan perdamaian.

Teori Demokrasi conflict governance menjelaskan bahwa untuk mencapai perdamaian oleh para pelaku konflik,dimana para pelaku konflik harus mempersuasi,memusyawarakkan dan mengimplementasikan kebijakan perdamaian yang telah tercapai.kebijakan perdamaian merupakan suatu hasil kebijakan penanganan konflik yang dicapai dari hasil musyawarah yang harus dilaksanakan oleh para pelaku konflik (Novri susan,M.A,2009,128-129)

Konflik dalam penelitian ini merupakan konflik yang menentang ketidakberfungsinya suatu lembaga yang memiliki fungsi penting dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat akan adanya kebijakan yang efektif yang mendukung pembangunan masyarakat atas kesepakatan antara pemerintah dengan pihak perusahaan dalam kesepakatan pembangunan PLTA LARONA dan PLTA karebbe.

Aksi protes yang berwujud aksi unjuk rasa adalah merupakan salah satu jalan masyarakat Desa Laskap untuk menyelesaikan konflik dengan pemerintah daerah yang menuntut akan permintaan listrik gratis, aksi ini dikawal oleh Forum Masyarakat Pemberdayaan Kecamatan Malili

Berdasarkan kutipan statement pihak DPRD dari konferensi pers dengan wakil ketua DPRD kabupaten Luwu timur MUH. Siddiq .BM. SH, pada tanggal 16 desember 2012, menyatakan bahwa;

*“Listrik gratis tidak mungkin dicapai, tetapi revisi nota kesepahaman ini bisa dilakukan, tentu ini bisa menjadi modal untuk dijalkannya program subsidi listrik kita di Luwu Timur”.*

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa masyarakat pada awal aksinya menuntut kebijakan pemerintah dari hasil penjualan ibah listrik perusahaan ke PLN dialokasi dalam bentuk pemberian listrik gratis yang notabennanya merupakan suatu hal yang sangat sulit dikarenakan bertentangan dengan ketentuan dalam nota kesepakatan tahun 1997 dalam pembangunan PLTA Larona, oleh karenanya tuntutan para unjuk rasa berkembang ke program subsidi listrik dan 9 desa binaan.

Informant “H” Membenarkan bahwa

*“Kami menuntut atas kebijakan yang efektif dari pemerintahan atas kesepakatan pemerintah dengan perusahaan dari manfaat yang diperoleh dalam pembangunan PLTA Larona dan PLTA karebbe dan solusi yang kami berikan termasuk pula menjadi isi tuntutan kami adalah 9 desa binaan dan subsidi listrik”* (wawancara dengan Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa, Via Telpon)



Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat menyarankan resolusi konflik dari konflik yang dipertentangkan adalah dalam bentuk program 9 desa binaan dan subsidi listrik, program 9 desa binaan adalah program pemberdayaan masyarakat pada desa sekecamatan Malili seperti, Desa Laskap, Lampia. Ponkeru, Malili, Wewangriu, Balantang, Langngaru, Pucak Indah dan Ussu.

Sedangkan subsidi listrik adalah pemberian dana konvensasi dari pemerintah daerah terhadap biaya pajak penggunaan daya listrik masyarakat, artinya jumlah biaya pemakaian listrik masyarakat kecamatan Malili sebagian ditanggung oleh pemerintah daerah.

Informant “M” menjelaskan bahwa,

*“Sangat sulit menerima tawaran dari para masyarakat sebagai solusi yang ditawarkan dari masalah ini yang turut mereka tuntut dari proses aksi protesnya, untuk mensubsidi listrik kecamatan Malili, dikarenakan untuk mensubsidi listrik masyarakat kecamatan Malili butuh anggaran yang besar, sedangkan anggaran yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk membiayai subsidi listrik masyarakat kecamatan malili, kalau disubsidi palingan juga subsidinya sebesar Rp. 10,000 satu rumah, dan juga untuk menjalankan program tersebut sangat sulit, dikarenakan pemberian perusahaan tersebut diperuntuhkan untuk seluruh masyarakat kabupaten Luwu Timur”.*”(wawancara dengan Kepala Bagian Kelistrikan Dinas ESDM tahun 2011 Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 18 Mei 2015)

Berdasarkan pernyataan diatas , beberapa tawaran solusi yang diberikan oleh masyarakat dari aksi protesnya, kenyatannya ditolak oleh pemerintah daerah dikarenakan beberapa tawaran solusi dari permasalahan yang pertanggungtangan sangat sulit diterapkan kemasyarakat, salah satu kesulitan yang dihadapi adalah minimnya anggaran dari hasil pendapatan daerah dari sektor penjualan ibah listrik.

Jika solusi yang ditawarkan masyarakat yang melakukan aksi protes diaplikasikan kemasyarakat sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah dari sektor ibah listrik tersebut , maka pada akhirnya akan memicu masalah sosial yang baru pada kehdiupan sosial masyarakat.

*Informant “M” membenarkan hal tersebut bahwa,*

*“Apabila pemma menyetujui permintaan para masyarakat yang melakukan aksi protes, maka akan muncul kecemburuan sosial masyarakat kecamatan yang lain yang berada dalam satu kabupaten luwu timur, seperti kecamatan angkona, kecamatan wotu ,kecamatan Tomoni dan kecamatan Burau, kalau beberapa masyarakat kecamatan ini juga meminta seperti itu dan wujud seperti aksi juga ,maka masalahnya semakin parah dikarena perusahaan memberikan listrik bukan untuk masyarakat kecamatan malili saja akan tetapi seluruh masyarakat Luwu Timur, termasuk masyarakat kecamatan yang tadi”.*(wawancara dengan Kepala Bagian Kelistrikan Dinas ESDM tahun 2011 Kabupaten Luwu Timur,pada tanggal 18 Mei 2015)

Dalam mengatasi permasalahan masalah sosial tersebut, pemerintah pada dasarnya telah membuat resolusi dalam bentuk kebijakan yang efektif dan tepat tanpa pada akhirnya memunculkan kekhawatiran akan adanya masalah sosial yang baru dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

*Informant” M “ menjelaskan bahwa,*

*“Pemerintah daerah telah membuat kebijakan atas pengelolaan anggran pendapatan daerah dari sektor ibah listrik dalam bentuk alokasi ke anggaran pembangunan infrastruktur daerah seperti pembangunan jalan, pemabngunan sekolah dan pembangunan puskesmas dan rumah sakit” .(wawancara dengan Kepala Bagian Kelistrikan Dinas ESDM tahun 2011 Kabupaten Luwu Timur,pada tanggal 18 Mei 2015)*

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah daerah telah membuat kebijakan sebagai resolusi dari permasalahan yang dipertentangkan oleh masyarakat dalam bentuk kebijakan pengalokasi anggran pendapatan daerah dari sektor ibah listrik keanggran pembangunan infrastruktur daerah yang manfaatnya menyeluruh diraskan oleh masyarakat daerah Luwu Timur, tanpa terkecuali.

Anggaran pendapatan daerah dari sektor ibah penjualan listrik, pengalokasiannya sebagai anggaran biaya pembangnan daerah pada bidang infrastruktur daerah, seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, dan pembangunan puskesmas serta rumah sakit bagi masyarakat kabupaten Luwu Timur,walaupun pada dasarnya kebijakan tersebut adalah kebijakan yang masih dapat dipertanyakan akan transparansi alur anggaran pada pembangunan infrastruktur tersebut

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A.Kesimpulan**

Dari peneilitian tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Konflik social (Perlawanan) yang terjadi antara pemerintah daerah dengan Masyarakat Desa Laskap merupakan konflik vertikal yang mempertentangkan masalah alokasi anggaran pendapatan daerah dari sektor ibah listrik.
2. Perusahaan PT.VALE memberikan ibah listrik kepda masyaraka Luwu Timur, sebesar 3 MW atas pembangunan PLTA Karebbe, Desa Laskap dan 5 MW dari pembangunan PLTA Larona.
3. Perusahaan PT.VALE menyatukan pemeberian listrik pada tahun 1979 atas pembangunan PLTA Larona sebanyak 5 MW dengang 3 MW atas ibah pembangunan PLTA Karebbe menjadi 8 MW
4. Sumber anggaran pendapatan daerah dari sektor listrik yakni berasal dari hasil penjualan listrik ke PLN sesuai ketentuan yang diatur bersama pemerintah daerah dengan pihak perusahaan PT.VALE
5. Bentuk konflik (Perlawanan) antara pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Laskap adalah dimulai dari pertentangan yang berwujud aksi protes kemudian berkembang menjadi tindakan anarkisme dan berujung pada pembubaran paksa oleh aparat kepolisian beserta tindakan kekerasan.
6. Tindakan anarkisme berbentuk pengrusakan lingkungan dan penutupan jalan

7. Resoulusi konflik (Perlawanan) dari konflik pemerintah daerah dengan masrayarakat Desa Laskap adalah masalah pertentangan yang berwujud aksi protes yang menuntut pemberian listrik gratis
8. Aksi protes pada akhirnya dipelopori oleh sebuah Forum yang bernama Forum Masyarakat Pemberdayaan Kecamatan Malili.
9. Subsidi Listrik dan 9 Desa Binaan, merupakan resolusi alternatif yang ditawarkan masyarakat setelah tuntutan Pemberian Listrik gratis tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.
10. Alokasi anggaran pendapatan daerah dari sektor listrik keanggaran pembiayaan pembangunan Infrastruktur merupakan resolusi yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai alasan penelohan resolusi yang ditawarkan masyarakat dalam hal ini para unjuk rasa.

## **B.Saran**

Konflik (Perlawanan) yang terjadi di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur merupakan peristiwa yang banyak memberikan kepada kita semua akan pelajaran mempelajari, mengamati dan menyelesaikan konflik, termasuk pemerintah pusat dalam hal ini memiliki tugas membuat dan menentukan kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan roda kepemrintahnya terkhusus dalam hal mensejahterkan masyarakat.

Pemerintah daerah seyogyanya, dalam membuat,menentukan, dan megimplementasikan kebijakan harus lebih mengedepankan model tranparansi, dalam hal ini adalah transparansi kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat dan satu hal yang penting juga adalah keseringan membangun dialog komunikasi antarstekholder dalam kehidupan masyarakat.

Begitu pula dengan masyarakat, sudah tepat dalam melakukan aksi protes untuk melakukan perubahan dalam menuntut otoritas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, akan tetapi aksi anarkisme bukan merupakan jalan terakhir dalam melakukan aksi protes, apabila segala tuntutan dari aksi belum terpenuhi, banyak hal yang dapat dialkukan selain tindakan anarkisme seperti, pengrusakan dan penutupan jalan.

Menjalankan pemerintahan dengan baik, Komunikasi publik, malakukan musyawarah dalam ruang sosial merupakan hal terpenting dalam mewujudkan aksi protes tanpa menimbulkan aksi anarkisme, dialog diruang tertentu antar pihak yang terkait dalam permasalahan dengan masyarakat dalam menentukan kebijakan politik adalah merupakan tindakan yang tepat selain melakukan aksi anarkisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suyanto,Bogan dan Sutinah;Metode Penelitian Sosial;KencanaPrenada Media Group;Jakarta:2011.
- Sugiyono,Prof.Dr;Memahami Penelitian Kualitatif;Alfabeta;Bandung;2014.
- K.Yin,Robert;Studi Kasus”Desain dan Metode”;Kharisma Putra Utama;2011.
- Bungi,Burhan;Analisis Data Penelitian Kualitatif;Kharisma Putra UtamaOffset;2010.
- Lexy, j moleong, Metode Penelitian Kualitatif (bandung, remaja rosda karya, 1991)
- Tri Pranoto,Marimin; Sosiologi;CV Regina;2006.
- Burhan, Bungin. Prop.Dr.H.M, Sosiologi Komunikasi,kencana prenada group,2011
- Susan,Novri. M.A, Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer,kenaca prenada group,2009
- Setiadi,elly.M & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi,Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya,kencana prenadamedia Group, 2011
- Nazir, mohammad,1998,Metode Penelitian, jakarta: Ghalia Indonesia
- Jhonson,doyle paul,1998,Teori Sosiologi Klasik dan Modern,Terjemahan Robert M.Z Lawang dari buku Sociological Theory Classical Founders and Cantemporary Prespective,jakarta: Gramedia.
- Sanderso, Stephen K, 2010, Makro Sosiologi,Jakarta, Kharisma Putra Offset.

- **Skripsi**

Anugrah,MUH.AB.PUTRA (2011),UNJUK RASA MAHASISWA DIKOTA MAKASSAR ( kasus perlawanan mahasisiwa Unhas terhadap kebijakan BHP).MAKASSAR: FISIP UNIVERSITAS HASANUDDIN

Sahlan,(2015),Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat),Makassar: FISIP UNIVERSITAS HASANUDDIN

- **Internet**

<https://annlistyana.wordpress.com/2012/04/27/makalah-realitas-demonstrasi-Indonesia>.

[http://kopel-online.or.id/warga-Malili-gelar demo-tuntut listrik gratis](http://kopel-online.or.id/warga-Malili-gelar-demo-tuntut-listrik-gratis),diakses pada tanggal 17 Juni 2015

<http://setetesilmu.blogspot.com>.26 DES,2015,20:49)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com),25 juni,14.07

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia))

- **Aturan Perundang - Undangan**

UU Nomor9Tahun1998 tentang kebebasan beresrikan dan berkumpul

Undang-undang No 30 tahun 2009, tentang ketenagalistrika, pasal 3 tentang penguasaa.pasal 4 tentang perusahaan dan pasl 5 tentang kewenangan pengelolaan.

Aturan Menteri ESDM No.4 tahun 2012 tentang harga pembelian tenaga listrik oleh PT.PLN ( persero) .



## **Lampiran I Dekumentasi**

### **Foto wawancara dengan informant “B”**



**Foto wawancara dengan informan “N”**



**Foto wawancara dengan informan “M”**



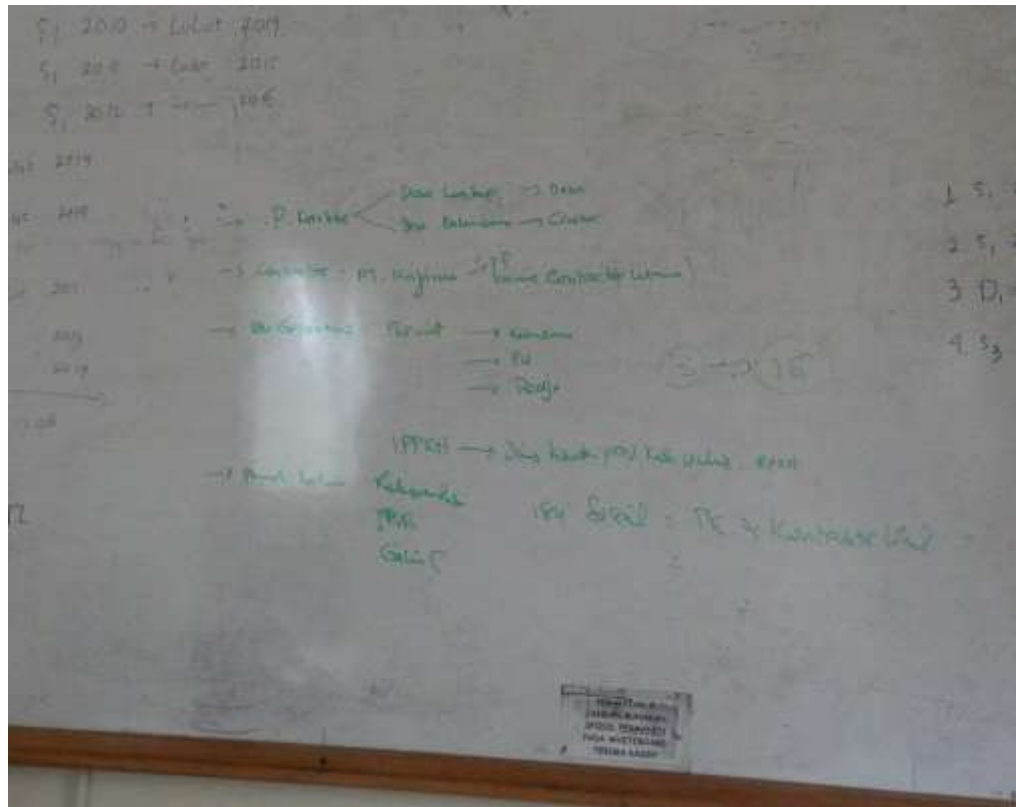
**Foto wawancara dengan informan “A’ dan “D’**




**Foto penjelasan Ketiga Danau, PLTA beserta program konvensasi bagi masyarakat**



## Foto penjelasan proses kontruksi PLTA Karebbe



## Lampiran II Surat keterangan pembacaan KWH GH. Balambano


**GOVERNMENT OF KARNATAKA**  
**DEPARTMENT OF EDUCATION**  
**OFFICE OF THE SECRETARY, DEPARTMENT OF EDUCATION**  
**BANGALORE - 560 002**  
**DATE: 20/05/2019**  
**TO: The District Education Officer, Mysore**  
**FROM: The Secretary, Department of Education, Government of Karnataka**  
**SUBJECT: Transfer of staff from Mysore District to Bangalore District**



**Lampiran III Gambar ketiga PLTA perusahaan PT. VALE beserta gambar ketiga danau sebagai sumber air pembangkit listrik**

**PLTA Larona**





## PLTA Balambano



## PLTA Karebbe



#### Lampiran IV Foto Gardu induk



## **Lampiran V Pedoman Wawancara**

### **Pedoman wawancara**

#### **A. PT.VALE**

1. Identitas informant:

nama :

tempat/tgl lahir :

umur :

jabatan :

2. Daftar pertanyaan:

1. apakah pihak perusahaan,sejatinya telah memberikan kepada masyarakat atas manfaat dari bendungan tersebut?
2. seberapa besar manfaat dari bendungan tersebut diberikan kepada masyarakat dalam hitungan megawatt?
3. apa tujuan perusahaan memberikan manfaat dari bendungan tersebut kepada masyarakat?
4. berdasarkan temuan di lapangan,pihak perusahaan telah memberikan manfaat dari bendungan tersebut ke masyarakat sekitar pabrik yakni kec.nuha sebelum memberikan kepada masyarakat seluruh kabupaten luwu timur,apakah pernyataan itu benar?
5. apa tujuan perusahaan terhadap pemberian tersebut?
6. apakah pihak perusahaan telah mengetahui bahwa atas dasar pemberian tersebut telah mengakibatkan konflik antar masyarakat dan pemerintah daerah?
7. Apakah pihak perusahaan mengetahui perkembangan konflik yang terjadi?
8. apakah ada resolusi konflik yang di berikan perusahaan terhadap konflik tersebut?
9. bagaimana bentuk resolusi yang di berikan perusahaan terhadap penyelesaian konflik tersebut

## **B. Masyarakat dan Pelaku aksi protes**

### **1. Identitas informat**

Nama :

Tempat/tgl lahir :

Umur :

pekerjaan :

### **2. Daftar pertanyaan :**

1. apakah bapak pernah melakukan Aksi protes?
2. apa yang melatarbelakangi aksi protes?
3. apakah bapak mengetahui atas pemberian manfaat dari bendungan yang di bangun di desa bapak kepada pemerintah?
4. berapa besar pemberian yang di berikan kepada pemerintah dalam bentuk megawatt yang bapak ketahui?
5. apa isi tuntutan aksi bapak,apakah hal diatas termasuk yang bapak kaitkan dalam aksi bapak?
6. apakah salah satu isi tuntutan bapak adalah pemberian listrik gratis?
7. Bagaimana perkembangan aksi protes bapak?
8. apakah tuntutan bapak disetujui pemerintah dan apa isi persetujuannya?
9. menurut bapak,apa resolusi yang baik bagi permasalahan ini selain dari tuntutan bapak?

### **C. Pemerintah/Dinas ESDM**

1. Identitas informant:

Nama :

Tempat/tgl lahir :

Umur :

Jabatan :

2. Daftar pertanyaan:

1. apakah pemerintah sejatinya telah menerima pemberian daya listrik bendungan larona 3 dari perusahaan Pt.vale
2. berapa besar daya yang telah di berikan?
3. apakakah sejatinya,atas pemeberian tersebut pemerintah telah menggratiskan beban penggunaan listrik masyrakat kec.nuha selama 1 tahun?
4. apakah pemerintah mengetahui adanya aksi unjuk rasa yang menuntut permasalahan tersebut?
5. bagaimana perkembangan aksi protes masyarakat yang pemerintah ketahui?
6. apakah pemerintah menyetujui beberapa tuntutan dari para aksi protes masyrakat?
7. bagaimana resousi yang di berikan pemerintah terhadap permasalahan tersebut?

## **Lampiran VI Undang-Undang Ketenagalistrikan**

### **Undang-undang No 30 tahun 2009**

#### **Pasal 3**

##### **penguasaan**

1. penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah.

2. untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewarganegaraannya, menetapkan kebijakan, penagturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik

#### **Pasal 4**

##### **pengusahaan**

1. pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan ushan milik negara dan badan usaha milik daerah

2. badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

3.usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksudkan pada pasal 3 ayat (1)pemerintah dan pemerintah daerah menyiapkan dana untuk;

a. kelompok masyarakat tidak mampu

b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik didaerah yang belum berkembang

d. pembanguna tenaga listrik didaerah yang terpencil dan perbatasan, dan

e. pembangunan listrik pedesaan

## **pasal 5**

### **kewenangan pengelolaan**

1. kewenangan pemerintah dibidang ketenagalistrikan meliputi;

a. penetapan kebijakan ketenagalisrikan nasional

b. penetapan peraturan perundang-undangan dibidang kelistrikan

c. penetapan pedoman,standar,dan kriteria dibidang kelistrikan

d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen



- e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional
- f. penetapan wilayah usaha
- g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara
- h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk  
bada usaha yang:
  - 1. wilayah usaha lintas provinsi
  - 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara
  - 3. menjual tenaga listrik atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
- i. fasilitas izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi
- j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan pemerintah
- k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dari sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah.

l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

m. penetapan izin usah jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanaman modal asing mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing

n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika pada jaringan milik pemegang izin penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha dibidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah

p. pengangkatan infrastruktur ketenagalistrikan

q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkatan pemerintahan

r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah.

2. kewenangan pemerintah provinsi dibidang ketenagalistrikan meliputi:

a. penetapan peraturan daerah provinsi dibidang ketenagalistrikan

- b. penetapan rencana umum ketegalistrikan daerah provinsi
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten atau kota
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten atau kota
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemangkas usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang iznnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi
- g. penetapan persetujuan penjual kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang iznnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi
- h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi ,multimedia dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga

listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi

i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha dibidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi

k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi

3. kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dibidang ketenagalistrikan meliputi;

a. penetapan peraturan daerah kabupaten atau kota dibidang ketenagalistrikan

b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten atau kota

c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten atau kota

d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten atau kota

- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabuapten atau kota
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual atau menyewakan tenaga listrik kepada badan usaha yang izn ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenag listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dala negeri
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau koat
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi,multimedia dan informatika pada jaringan milki pemegang izin usaha peneyedian tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabuapaten atau kota
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usah dibidang ketenagalsitrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota

- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten atau kota
- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com),25 juni,14.07).

## RIWAYAT HIDUP

**Arbin** lahir di Malili, 1 Maret 1993. Putra kedua dari bapak Alpan dan Ny.Yuliyana. Penulis menghabiskan masa sekolah di SD hingga SMA di Kota Malili. Menempuh pendidikan di SD 242 Patande dan lulus pada tahun 2005. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Malili lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Malili dan lulus tahun 2011. Di tahun yang sama (2011), penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar memilih Jurusan Sosiologi. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan intra dan ekstra kampus, salah satunya menjadi pengurus aktif pada Lembaga mahasiswa jurusan tahun 2012-2013, Pengurus KPU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2012-2013.

